



MENJANGKAU MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN SERTA MENGURANGI KESENJANGAN: MEMPERBAIKI KETEPATAN SASARAN, DESAIN, DAN MEKANISME PROGRAM

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

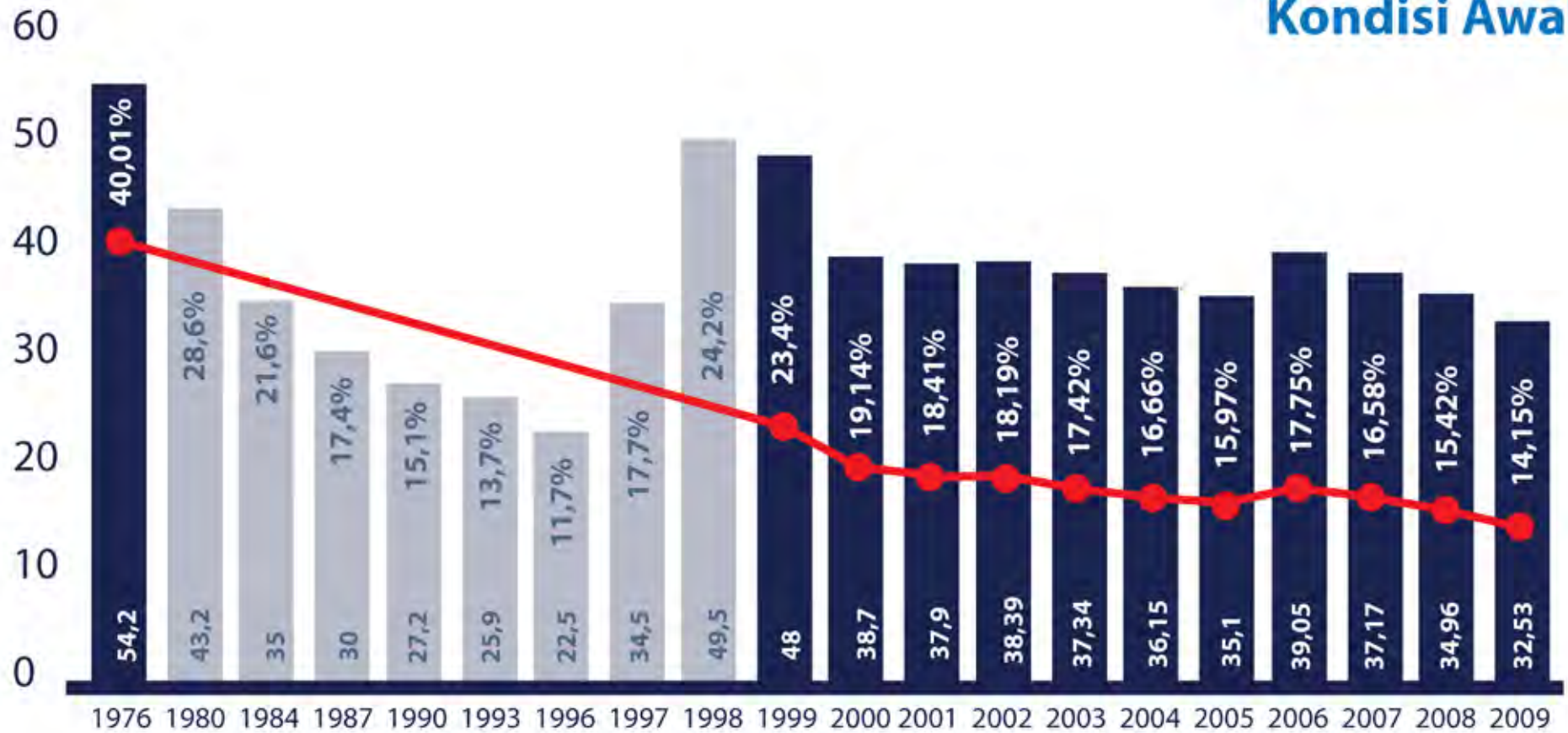
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Pemerintahan **SBY-Boediono** Penanggulangan Kemiskinan Menjadi Prioritas



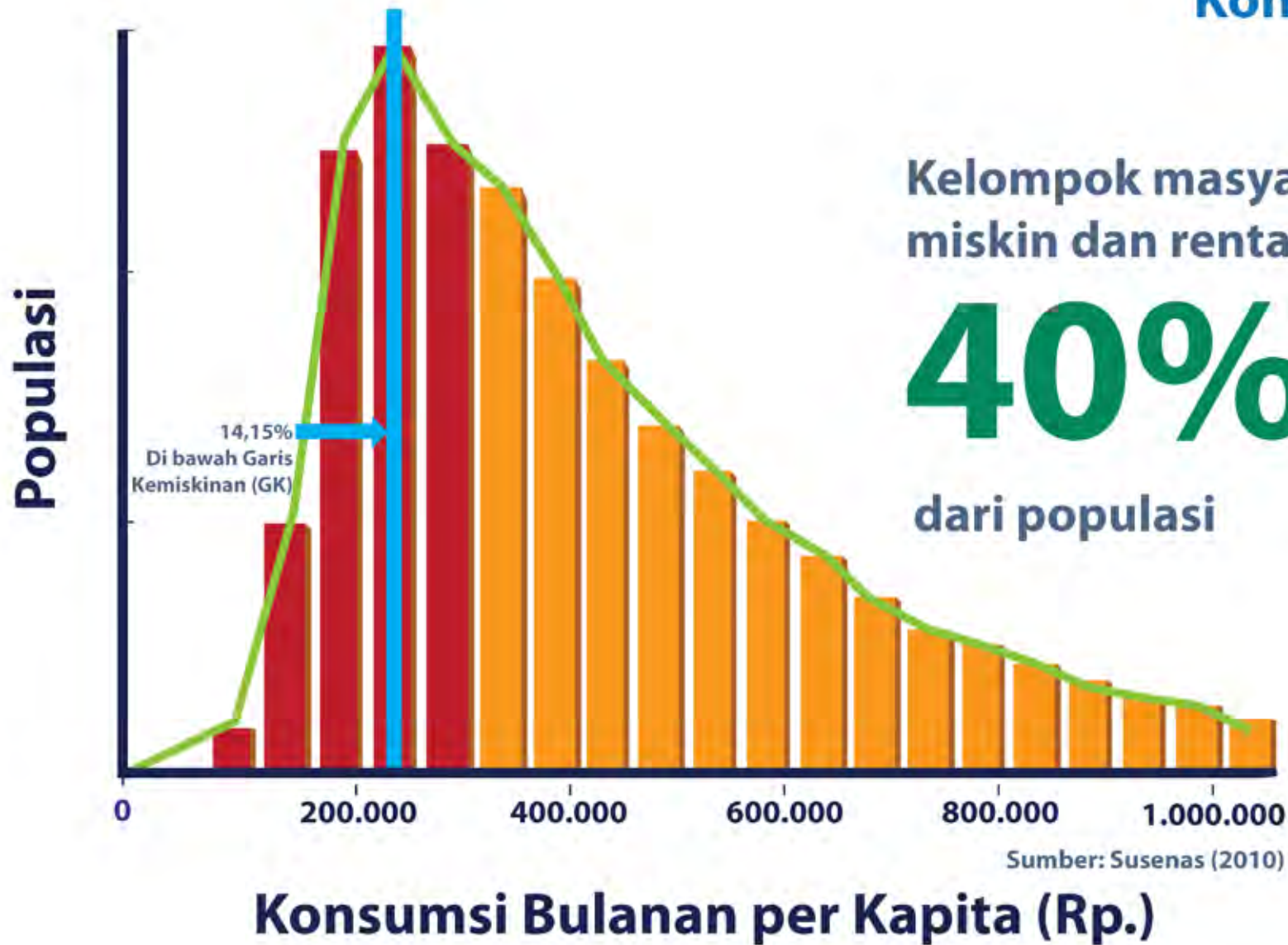
Kondisi Awal



Tingkat persentase kemiskinan menurun namun pada tahun-tahun terakhir terjadi perlambatan penurunan kemiskinan

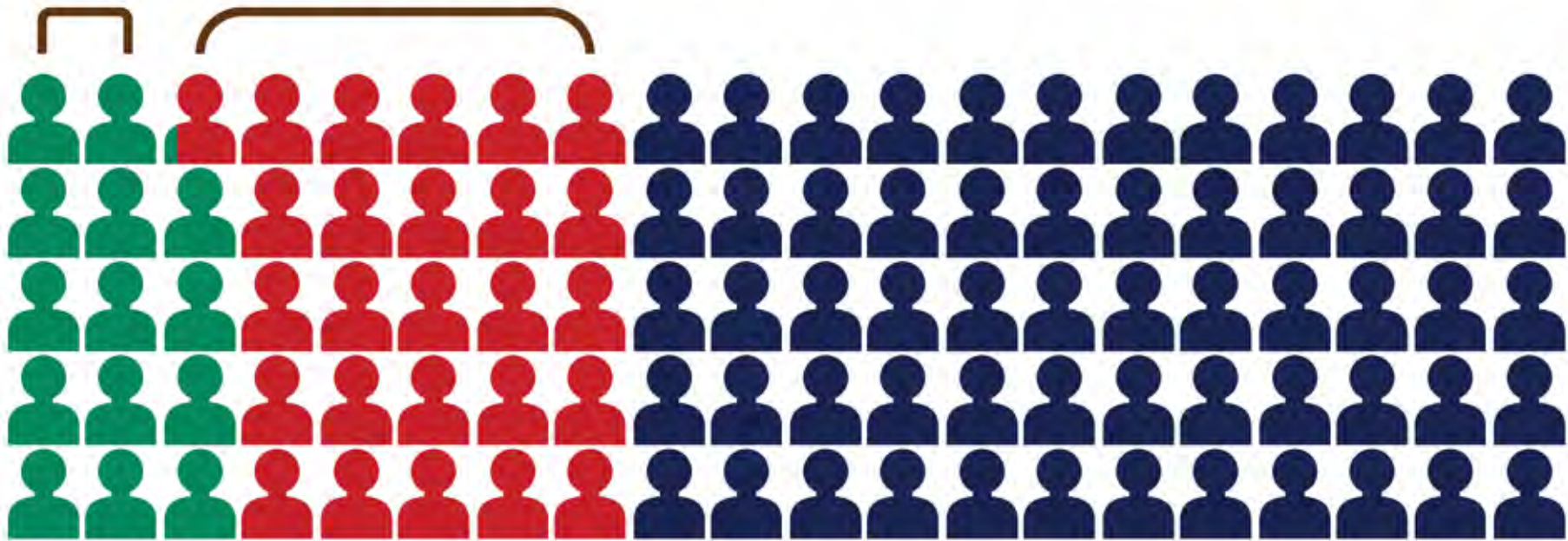
Jumlah penduduk miskin **32,53** juta jiwa (2009)

Kondisi Awal



14,15%

25,85%

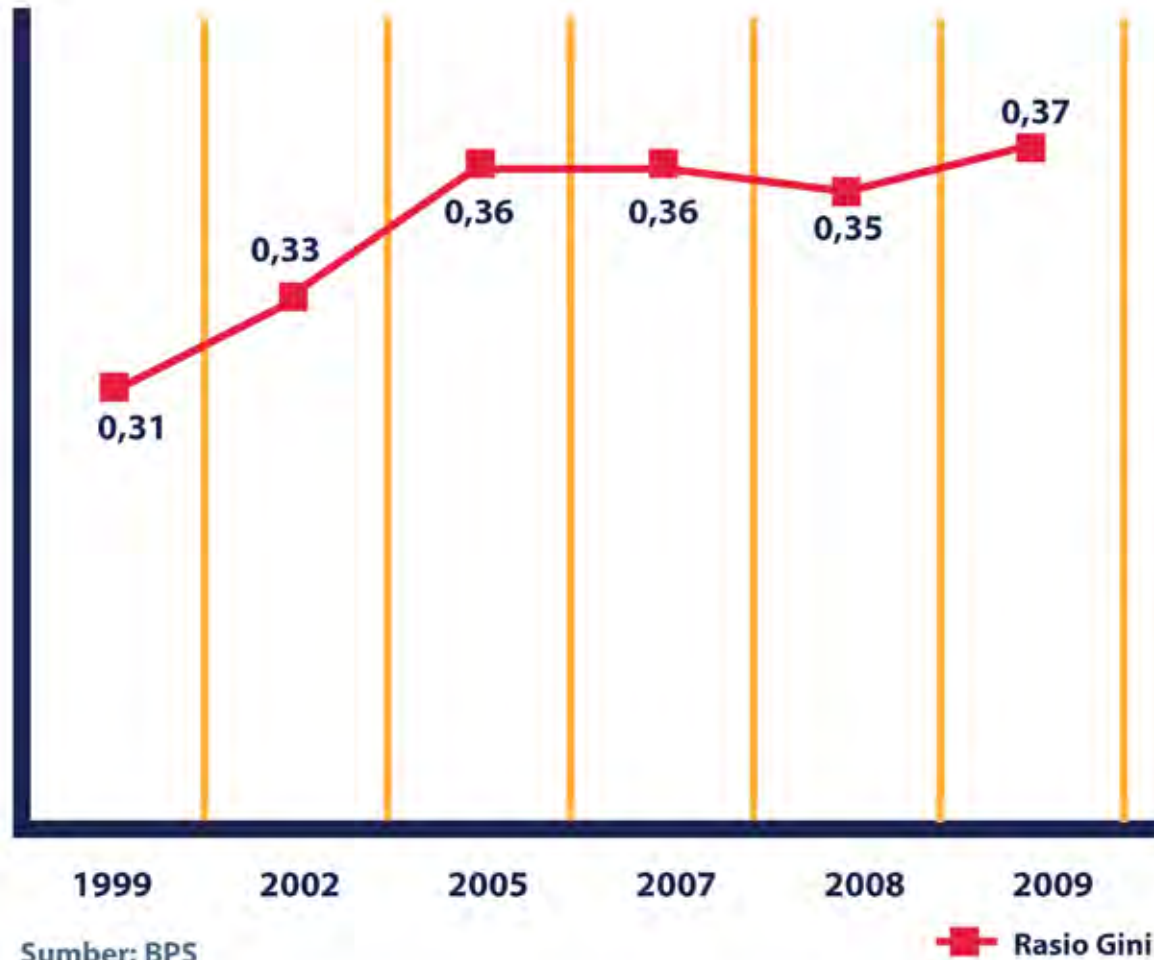


40%

4 dari 10 orang

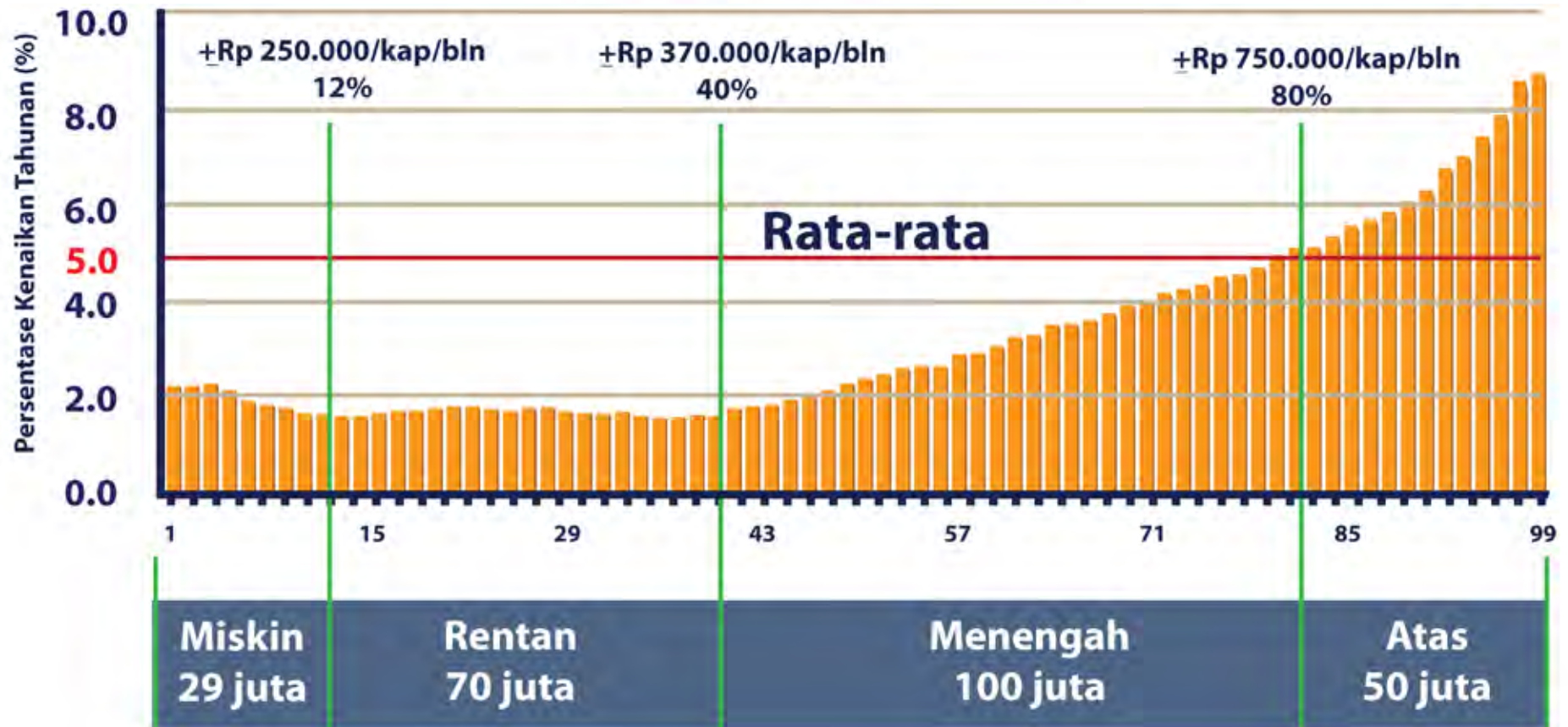
rentan terhadap gejolak ekonomi

Rasio Gini

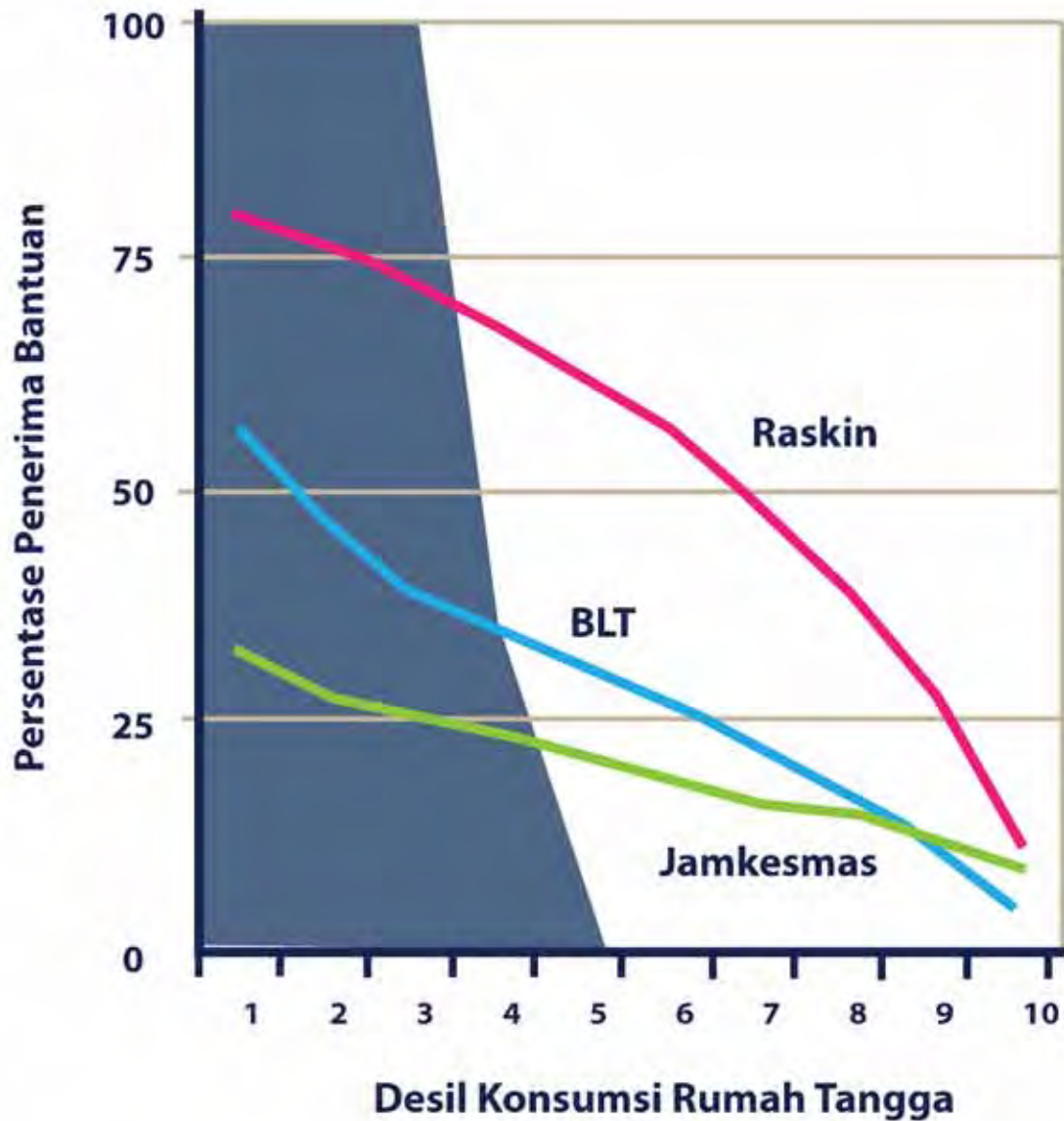


Peningkatan ketimpangan sudah dimulai sejak 1999. Koefisien gini meningkat dari **0,31** pada tahun 1999 menjadi **0,37** pada tahun 2009

Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat 2008 - 2012



Kondisi Awal



Hanya

30%

penduduk miskin
yang menerima



Dasar Hukum Terbentuknya **TNP2K**



Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010
Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan



Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010
Tentang Struktur Kelembagaan dan Mekanisme Kerja TKPK

Mandat Utama **TNP2K**

- **Memperbaiki Sasaran Program Berbasis Rumah Tangga dan Wilayah**
- **Memperbaiki Mekanisme Penyaluran Program**



2010



Pedoman Awal

2014



Laporan Akhir

Basis Data Terpadu (BDT)

2005

Kriteria Rumah tangga Miskin

Pak siapa saja sih yang berhak mendapatkan dana kompensasi BBM?

Yang berhak adalah rumah tangga yang memenuhi 9 atau lebih dari 14 ciri rumah tangga miskin seperti berikut ini



Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 6 m² per orang



Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murah



Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ runtu/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa di plester



Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain



Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik



Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan



Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah



Hanya mengonsumsi daging/ telur/ ayam satu kali dalam seminggu



Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun



Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari



Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik



Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: Petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan



pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD



Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya

OK, sedangkan yang TIDAK memenuhi syarat untuk mendapatkan SLT adalah: a) Rumah tangga yang hanya memenuhi 1-8 ciri rumah tangga miskin, b) PPhS, TMS, Pairs/ pensiunan, c) Pengungsi yang diurus oleh pemerintah, dan d) Penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal

Tidak benar, selain itu harap diingat juga 1. Pembayaran SLT dilakukan hingga 31 Desember 2005, jadi tidak perlu berbondong-bondong ke kantor pos pada awal yang mana. Salur aja... 2. Bila anda merasa makan lagi belum terdistribusi, silahkan maklar ke posko warga dengan 31 Oktober 2005 untuk diwasi partus atau tidaknya menerima SLT. 3. Bagi siapa saja baik petugas maupun masyarakat yang memberikan data tidak benar akan ditindak tegas dan dikenakan hukuman pidana

Yang tidak yakin jangan ragu-ragu makan, mau ah!



Lokasi Uji Coba Pengembangan Metodologi PPLS 2011

Bekerjasama dengan Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)-MIT

Ogan Komering Ulu
Tegal
Wonogiri
Garut
Bogor

Lampung Tengah
Palembang
Bandar Lampung
Pemalang

38

Kabupaten/Kota

***"Konsultasi yang paling akurat adalah
bertanya pada masyarakat miskin itu sendiri"***

Menurunkan *Inclusion* dan *Exclusion Error*

	Miskin	Tidak Miskin
Menerima bantuan		
Tidak menerima bantuan		

Pendataan 2011

Kelompok Karakteristik

Variabel

Karakteristik rumah tangga

Status kepala rumah tangga
Jumlah anggota rumah tangga
Jumlah anggota rumah tangga usia produktif
Jumlah anak bersekolah

Kondisi sosial ekonomi

Tingkat pendidikan kepala rumah tangga
Tingkat pendidikan anggota rumah tangga
Status pada pekerjaan utama
Status kepemilikan rumah

Keadaan rumah tinggal

Status kepemilikan rumah
Dinding
Atap
Lantai
Sumber penerangan listrik
Bahan bakar untuk memasak
Sumber air minum
Cara memperoleh air minum
Pemakaian fasilitas tempat buang air/toilet
Tempat buang air

Kepemilikan aset

Kulkas
Tabung gas 12 kilogram
Telepon seluler
Kendaraan

“ Jumlah variabel yang dicacah jauh lebih banyak dibanding 2005 & 2008 ”

BPS

Hasil
Pencacahan

TNP2K
TIM NASIONAL PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PMT

BDT

Hasil

Telah
diselaraskan
dengan data
Adminduk

Daftar nama & alamat

40%

rumah tangga dengan
status sosial ekonomi terendah.

25 juta rumah tangga
96 juta jiwa



BDT merupakan bagian dari Open Government Indonesia



BDT

<http://bdt.tnp2k.go.id>

Daftar nama & alamat



Masyarakat luas

56

Permintaan dari 21
Kementerian & Lembaga

65

Permintaan dari 31
Provinsi

513

Permintaan dari 308
Kabupaten/Kota

“ Data harap dijaga tidak untuk kepentingan politik dan komersial ”

~Wapres Boediono

<http://bdt.tnp2k.go.id>



> 1.000.000

Kunjungan situs website

Kartu Perlindungan Sosial (KPS)



25 % rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah atau **15,5 juta** rumah tangga miskin dan rentan



Untuk Mendapatkan BLSM, BSM, Raskin, & Kartu JKN

TNP2K Mendesain Sosialisasi KPS

Mekanisme Pemutakhiran Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)



BASIS DATA TERPADU





MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NO. 54/3150/SJ

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAGIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS)
DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

JAKARTA, 17 JUNI 2013

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 54/3150/SJ

Tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Layanan Aspirasi & Pengaduan Online Rakyat **LAPOR!** Bersama UKP4

**KONTAK
PENGADUAN**



LAPOR! Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Kunjungi situs www.lapor.ukp.go.id atau SMS ke 1708, ketik:

KPS (spasi) Nomor KPS (spasi) isi aduan (penerima KPS)

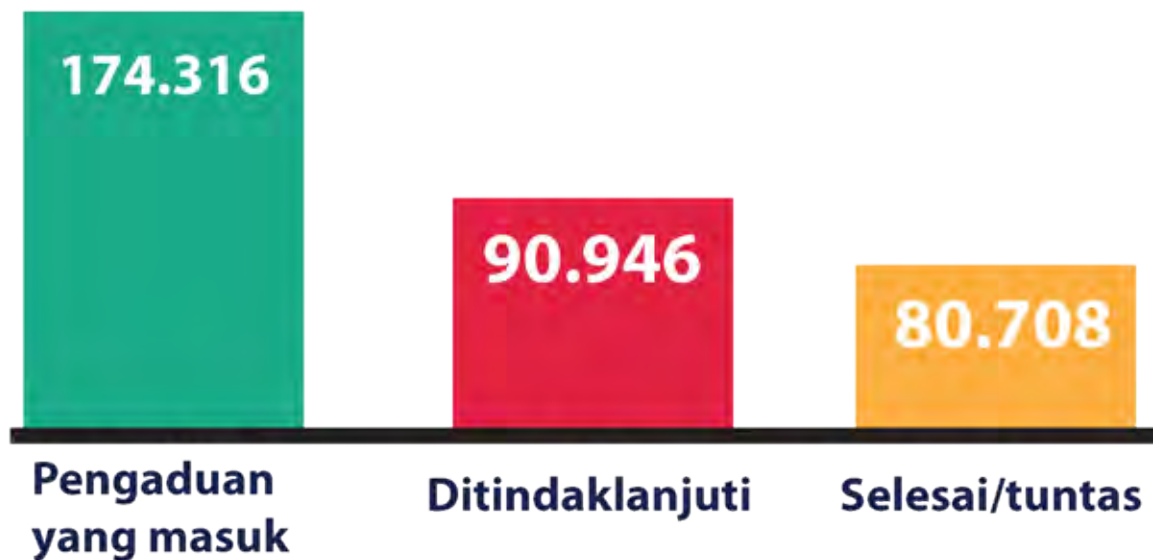
KPS (spasi) isi aduan (bukan penerima KPS)

Contoh SMS:

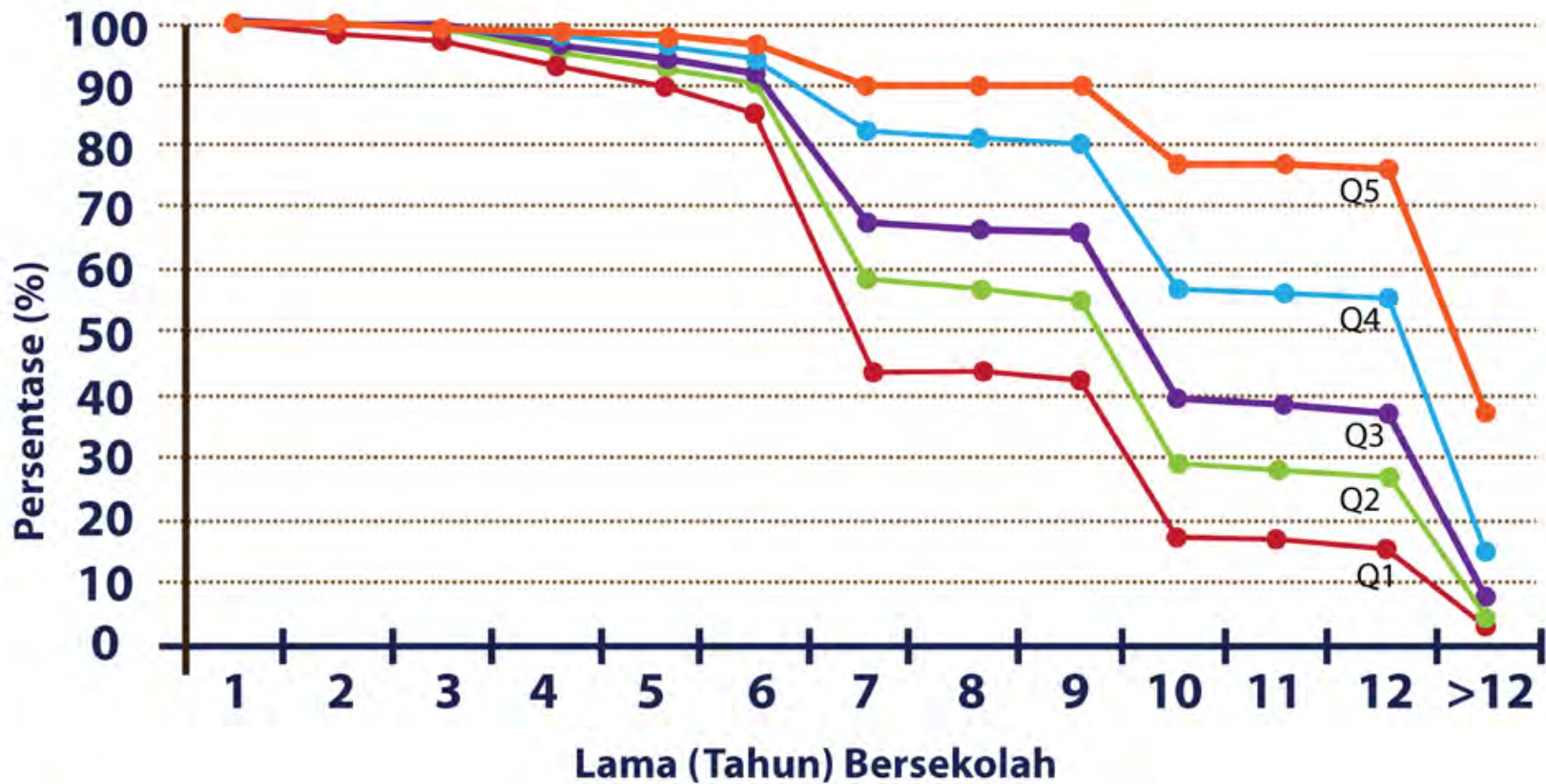
KPS 888bdF56789009 Rumah tangga di desa saya hanya menerima 5kg Raskin (penerima KPS)

KPS Rumah tangga di desa saya hanya menerima 5kg Raskin (bukan penerima KPS)

Jumlah Pengaduan Sampai Juli 2014

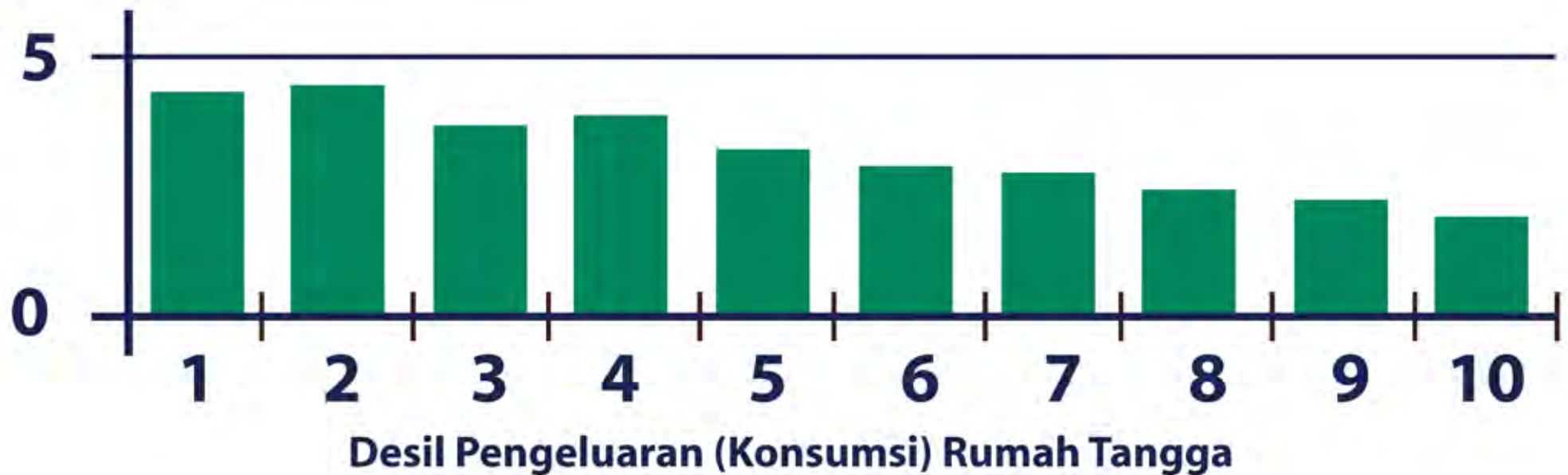


Bantuan Siswa Miskin (BSM)



“ Angka **drop out masyarakat miskin** baik antar jenjang kelas maupun antar jenjang pendidikan sangat tinggi ”

Kurang dari **10%** masyarakat miskin yang mendapat BSM



■ Persentase anak usia 6 – 18 tahun yang menerima BSM

Uji Coba Kartu BSM 2012/2013

Kelas 1 SD/MI
270.000 siswa

Kelas 1 SMP/MTs
732.000 siswa

Hasil Pembelajaran Uji Coba

- ✓ ***Sosialisasi***
- ✓ ***Koordinasi antar instansi***
- ✓ ***Keakuratan data***

Sebelumnya

2013



**BERBASIS
SEKOLAH**



**BERBASIS
RUMAH TANGGA**

- **Menggunakan KPS**
- **16,6 juta siswa**

Perbaikan Penetapan Sasaran BSM Menggunakan KPS



TNP2K Mendukung **SOSIALISASI BSM 2013-2014**



Cakupan Sosialisasi

114

Kab/Kota

34

Provinsi

1.114

Sekolah

Aktivitas

12

Media Briefing

1.000

Radio Spot

20.000

Poster

1.114

Sekolah dikunjungi

10

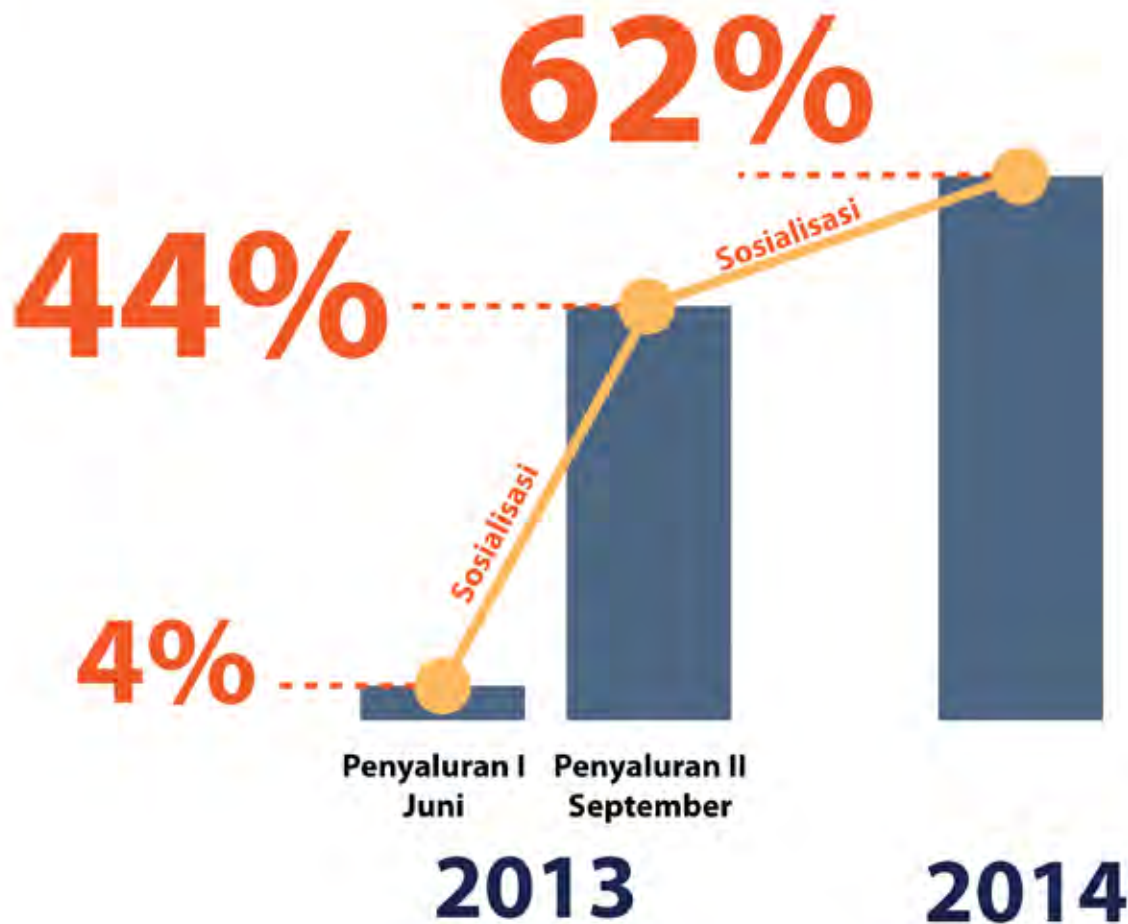
Kota

127

Radio Lokal

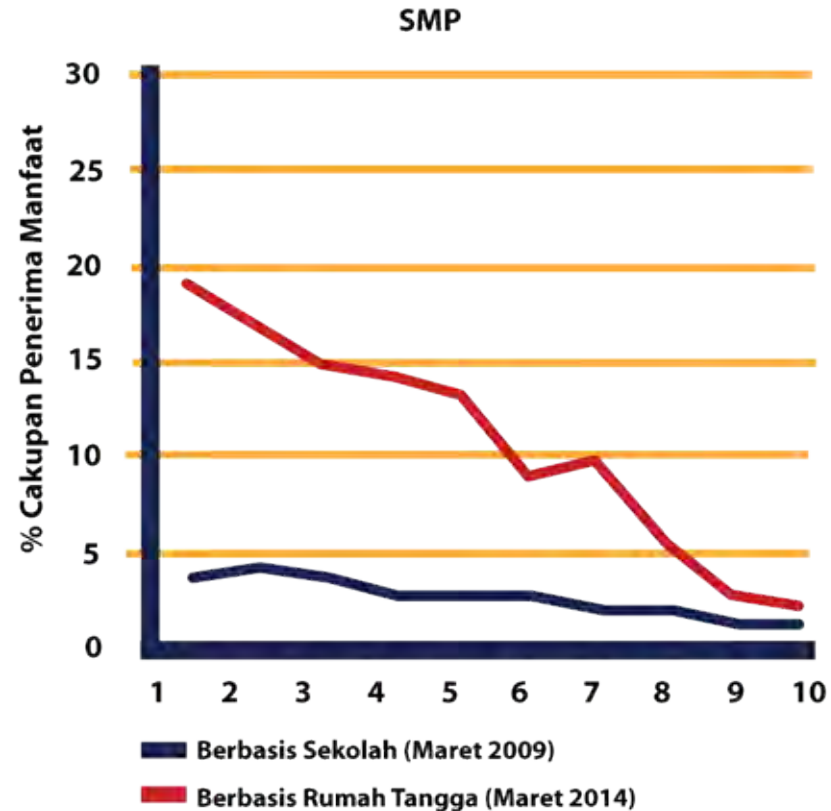
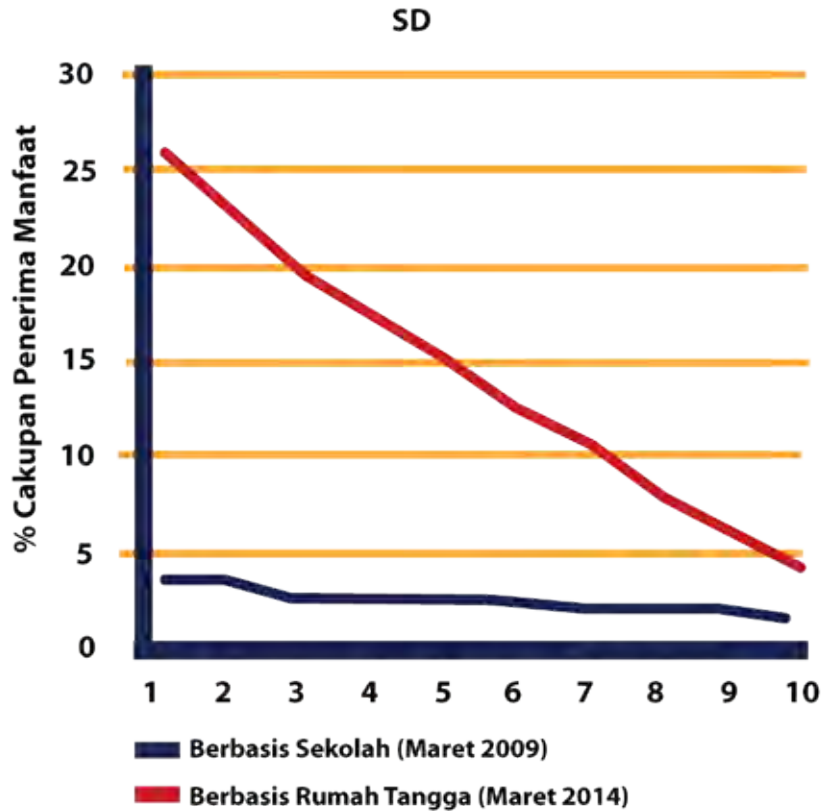
“Juga berhasil mengumpulkan 1.114 kontak Kepala Sekolah/Guru”

Peningkatan Pemanfaatan KPS untuk BSM



Penggunaan KPS

Memperbaiki Kinerja Penetapan Sasaran BSM



Sumber data: Susenas, BPS

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jamkesmas

Premi = Rp 5.000/Orang/Bulan



Rp 1.000 untuk kapitasi

Tidak *sustainable*

Kajian Besaran Kapitasi

Rp 1.000/Jiwa/Bulan

Dirasa cukup karena tidak mencerminkan biaya sebenarnya

➔ Subsidi gaji, obat, dll

Klaim / jumlah kunjungan \approx Rp 700

Hasil penelitian TNP2K - GIZ

biaya sebenarnya **Rp 6.000/Jiwa/Bulan**

Proyeksi Perhitungan Premi Jamkesmas Tahun 2014 Skenario 13

	Bi. RJTP	Bi. RJTL	Inflasi	Utilisasi	Usia Populasi	Pergeseran Penyakit	Bi. Manajemen	Cadangan
Disesuaikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besaran	6.000			7,8 & 7,4	750	750	5%	5%

No	Komponen Utama	Biaya Layanan per Orang (Rp)	Utilisasi (per1.000)	Biaya/Orang/Bulan (Rp)
1.	Biaya Rawat Jalan Tingkat I Puskesmas/Dokter Umum dengan cara kapitasi	6.000		6.000
2.	Biaya Rawat Jalan Tindak Lanjut di Rumah Sakit Medis Obat	157.224 243.158	7,8 7,4	1.226 1.799
3.	Biaya Rawat Inap di Rumah Sakit Medis Obat ICU,ICCU,HCU Akomodasi	1.399.989 305.554 2.200.369 539.561	2,2 10,7 0,1 2,1	3.080 3.269 220 1.133
4.	Penyesuaian Resiko Usia Populasi			750
5.	Penyesuaian Pergeseran Penyakit			750
Total Biaya Medis/Orang/Bulan				18.228
6.	Biaya Manajemen (5%)			911,41
7.	Biaya cadangan (5%)			911,41
				20.051

Perangkat Aturan Penyaluran Dana Kapitasi Kepada FKTP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Perpres No. 32 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama



Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014



Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2280/SJ

TNP2K Mendukung **SOSIALISASI JKN 2014**



Cakupan Sosialisasi



TNP2K juga mendukung Sosialisasi Perpres, Permenkes, dan SE Mendagri tentang Dana Kapitasi

Aktivitas



417 Kab/Kota telah menyampaikan SK Bupati penunjukan Bendahara Dana Kapitasi

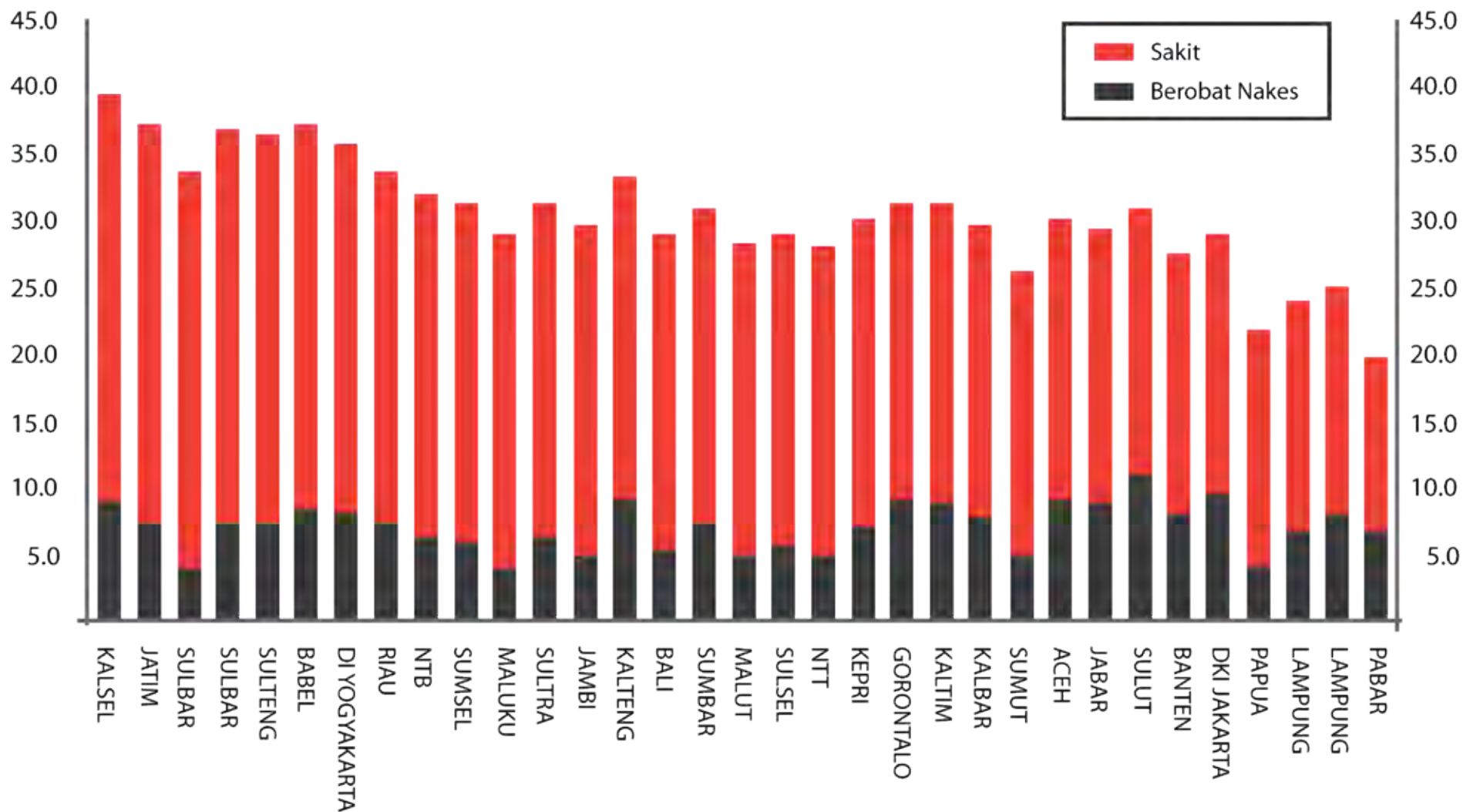
“Juga berhasil mengumpulkan 1.106 kontak kepala Puskesmas”

Tantangan *Supply Side*



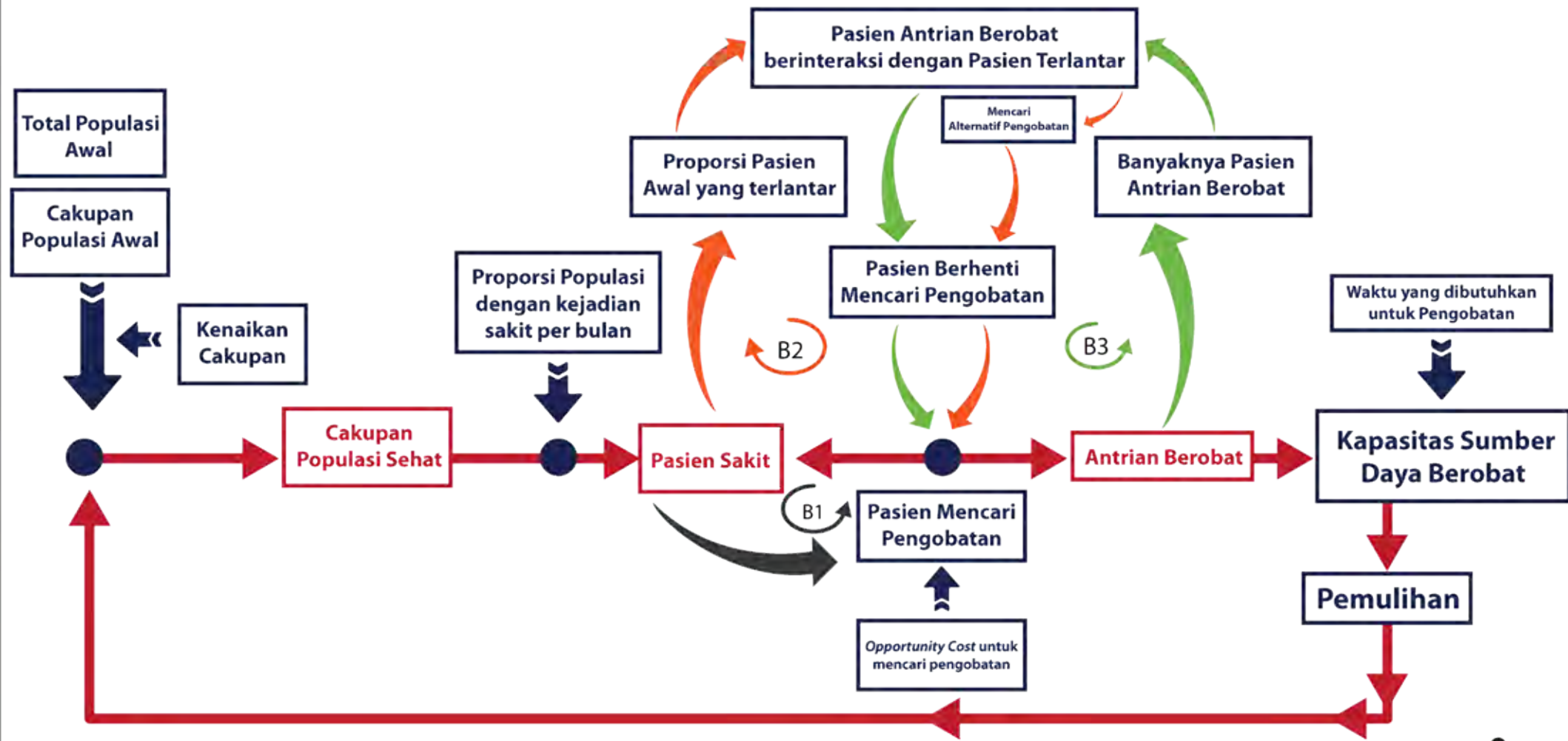
**Masyarakat masih harus antri
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan**

Proporsi Penyakit Hipertensi Terdiagnosa dan *Unmet Needs* Menurut Provinsi



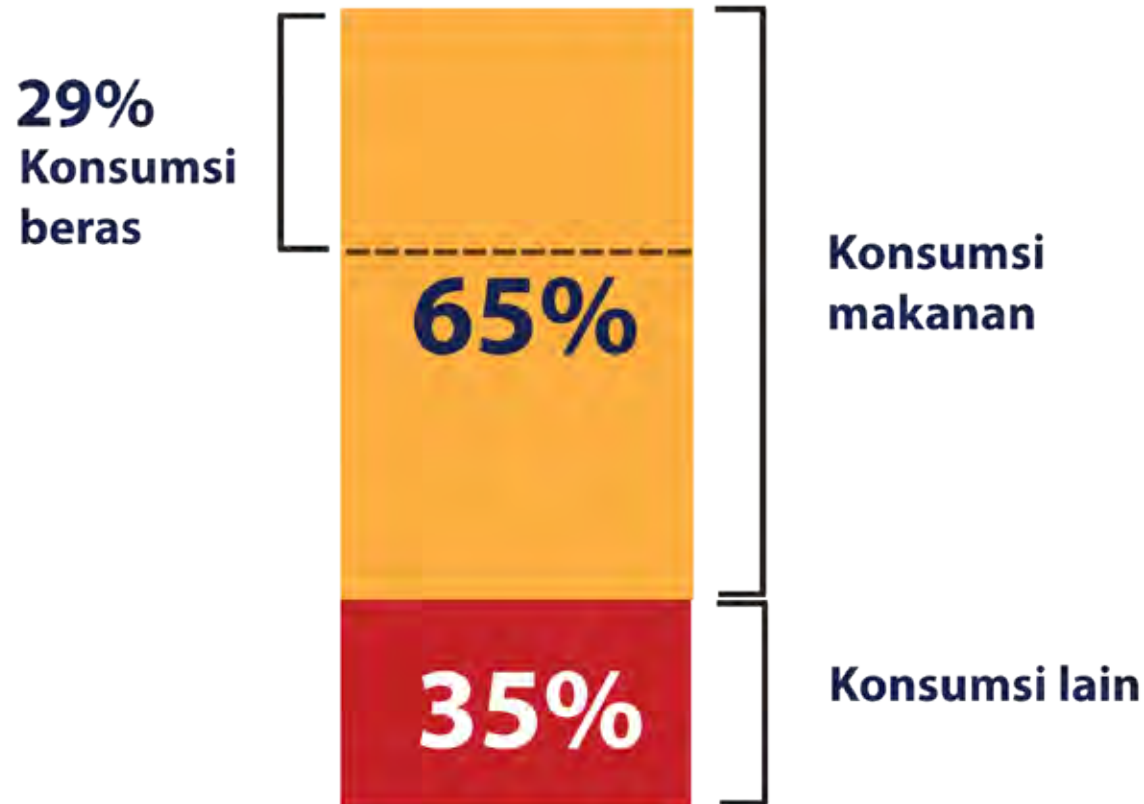
Model Sistem Dinamik

Estimasi Kesenjangan Sisi *Supply* dan *Demand* Pelayanan Kesehatan



Raskin

Mengapa Raskin?



1998

OPK

Operasi Pasar Khusus



2002

RASKIN

Beras untuk Keluarga Miskin



2012

RASKIN

Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Tantangan Program Raskin

**Tidak
Tepat**



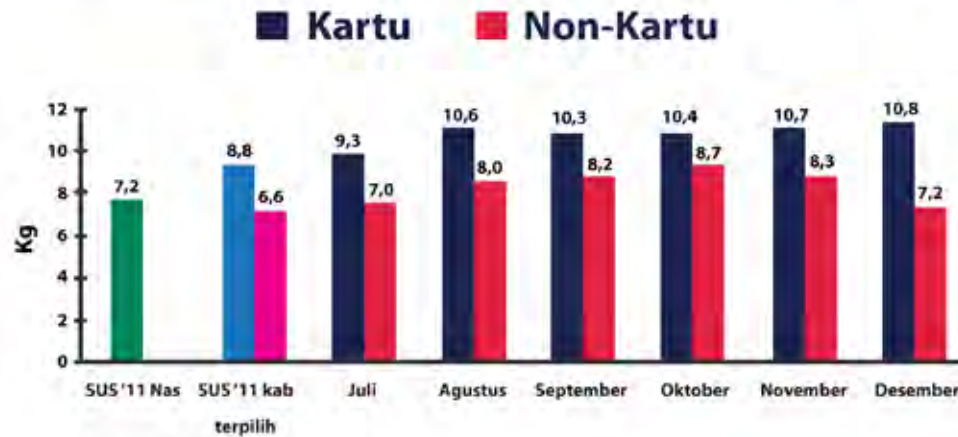
Tahapan Proses Menuju Perbaikan Program Raskin

- Pemanfaatan BDT
- TNP2K melakukan ujicoba dengan mengirim Kartu Raskin ke **1,3 juta RTS-PM** di **53 kabupaten/kota** di **7 provinsi**
- Pemantauan efektivitas ujicoba Kartu dilakukan dengan mensurvei **3.300 Rumah Tangga** di **22 kabupaten/kota** di **11 provinsi**
- TNP2K bekerja sama dengan J-PAL melakukan eksperimen Kartu Raskin di **572 desa** di **6 kabupaten/kota** untuk menguji desain Kartu, informasi yang perlu ada dalam Kartu, dan target Kartu



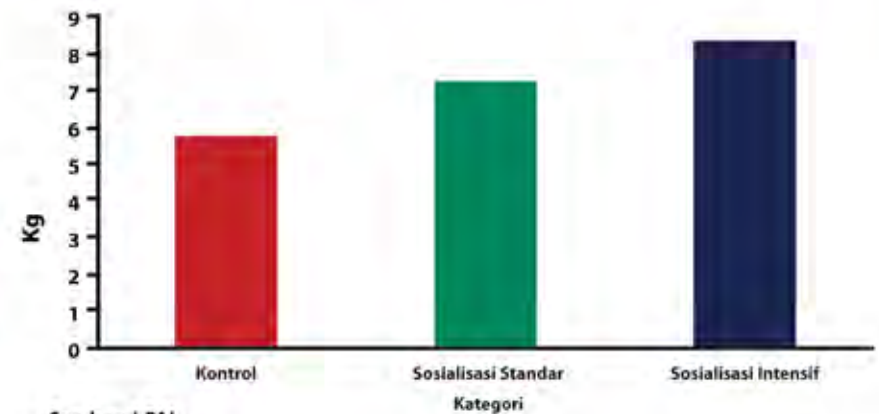
Kartu efektif dalam meningkatkan jumlah Kg yang diterima dan menurunkan harga tebus yang dibayarkan RTS-PM

Jumlah Kg Beras yang Diterima RTS-PM



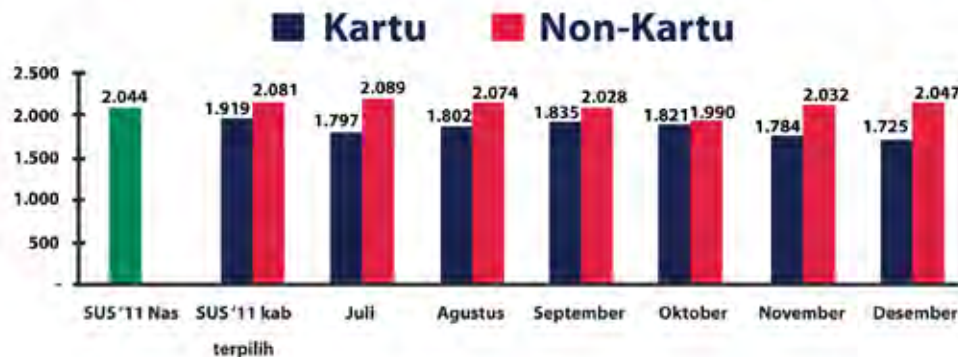
Sumber: Pokja Monev, Set. TNP2K

Jumlah Kg Beras yang Diterima RTS-PM



Sumber: J-PAL

Rupiah yang Dibayarkan RTS-PM per Kg



Sumber: Pokja Monev, Set. TNP2K

Penggunaan Kartu dan Sosialisasi Efektif untuk Perbaiki Program Raskin

Penyaluran Beras Sampai ke Titik Distribusi oleh BULOG



// Salah satu sumber utama keterlambatan, menurut hasil *Business Process Review & Re-engineering (BPR)* Raskin yang dilakukan oleh Tikor Raskin Pusat - WB - Deloitte (2014), adalah penerbitan Penerbitan Surat Permintaan Alokasi (SPA) 2013 membutuhkan waktu rata-rata 33 hari untuk diproses. **//**

Terdapat **50.000** Titik Distribusi
di **515** kab/kota

Penyaluran Beras dari Titik Distribusi ke Rumah Tangga oleh PEMDA

TNP2K Bekerja sama dengan Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)

Saat ini, Aparat Desa menerima Raskin di Titik Distribusi dan mendistribusikannya ke masyarakat

Uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah membuka kesempatan bagi pihak lain/masyarakat umum untuk menyalurkan Raskin di desa dapat memperbaiki distribusi Raskin

Uji coba di
572 desa



Individu/kelompok dapat berkompetisi untuk memperoleh kesempatan menyalurkan Raskin



Kesimpulan:
tidak memperbaiki distribusi Raskin

TNP2K Mendukung **SOSIALISASI RASKIN 2014**

Cakupan Sosialisasi



Aktivitas



“Juga berhasil mengumpulkan 1.136 kontak Kepala Desa/Lurah”

Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Tunai Bersyarat

Tujuan:

Memutus mata rantai kemiskinan antar generasi



Tantangan PKH

- **2007 - 2009** cakupan masih **388.000-726.000** keluarga dan hanya berstatus uji coba
- **Verifikasi dan sanksi** belum sepenuhnya diterapkan
- Target pada **2014** **mencapai sasaran 3,2 juta keluarga** sangat miskin

**BUKU KERJA
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

UPPKH Kementerian Sosial dan TNP2K
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

TNP2K membantu Kementerian Sosial dalam:

- **Memperbaiki pelaksanaan program PKH**
- **Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi**

OKTOBER
2011



Tahun 2014 PKH akan Menjangkau

34 Provinsi

333 Kabupaten/Kota

3,2 Juta Peserta



TNP2K mendukung peningkatan kinerja PKH dengan mengembangkan SMART PKH (Sistem Monitoring dan Analisis Regular Triwulanan)

Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program

Dampak PKH Terhadap Pencapaian Pendidikan

- Menurunkan angka putus sekolah sebesar **0,7%**
- Meningkatkan partipasi kasar SMP **4.5%** dan partisipasi murni SMP **2,6%**
- Memberikan efek nyata dalam mengurangi tingkat tenaga kerja anak **1,3%**

Dampak PKH Terhadap Perubahan Perilaku Kesehatan

- Menaikkan tingkat kelahiran dibantu bidan bersertifikat **6,4%** dan meningkatkan kelahiran di fasilitas kesehatan **6,8%**.
- Menaikkan tingkat imunisasi lengkap sesuai jadwal umur **3,5%** dan tingkat imunisasi lengkap **3,7%**.
- Meningkatkan kunjungan rawat jalan ke fasilitas kesehatan publik **0,8%**. Namun, PKH berdampak negatif terhadap kunjungan post natal ke fasilitas kesehatan **0,23 kali**, karena ibu cenderung memilih dukun untuk perawatan pasca kelahiran.



**TNP2K menyusun *exit strategy*
➔ Transformasi Kepesertaan PKH**



Resertifikasi PKH

626.369 Peserta
Kohor 2007 & 2008

13 Provinsi

72 Kabupaten

631 Kecamatan

Bahan Sosialisasi Resertifikasi PKH yang Disiapkan Oleh TNP2K



TNP2K Membangun Mekanisme Pengaduan Hasil Resertifikasi Hasil Resertifikasi Kohor 2007 - 2008

Jumlah RT	626.369
Transisi	387.728
Graduasi	238.641[*]

*** 164.097 di antaranya *Natural Exit***

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

“ PNPM menggabungkan kekuatan masyarakat madani, partisipasi masyarakat lokal, serta transfer langsung dari pemerintah kepada masyarakat ”

”

Variasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Aspek Pemberdayaan	KEMENDAGRI dan Kementerian PU	Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Kelautan & Perikanan
Pendampingan-Fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendampingan oleh Fasilitator sepanjang pelaksanaan kegiatan ● Memiliki Fasilitator Pemberdayaan masyarakat dan Fasilitator Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendampingan oleh fasilitator paruh waktu ● Tidak memiliki fasilitator pemberdayaan
Partisipasi dan Perspektif Jender	<ul style="list-style-type: none"> ● Masyarakat terlibat sejak persiapan, pemetaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. ● Fasilitasi pertemuan khusus perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mekanisme pelibatan masyarakat dalam persiapan, pemetaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tidak sesuai dengan kaidah pemberdayaan masyarakat. ● Tidak ada pertemuan khusus dengan kelompok marginal dan kaum perempuan.
Pengorganisasian Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> ● Mekanisme pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kaidah pemberdayaan masyarakat ● Pengorganisasian masyarakat dilakukan melalui pembentukan kelompok berbasis manajemen lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak ada mekanisme pengorganisasian masyarakat ● Misalnya, PUAP menggunakan GAPOKTAN sebagai kelompok masyarakat
Transparansi dan Sistem pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kelompok wajib melaporkan kepada masyarakat melalui papan informasi ● Ada musyawarah kelurahan/desa sebagai mekanisme pertanggungjawaban ● Dilakukan Audit 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kelompok tidak melapor kepada masyarakat Tidak ada musyawarah sebagai mekanisme pertanggung jawaban ● Tidak dilakukan audit



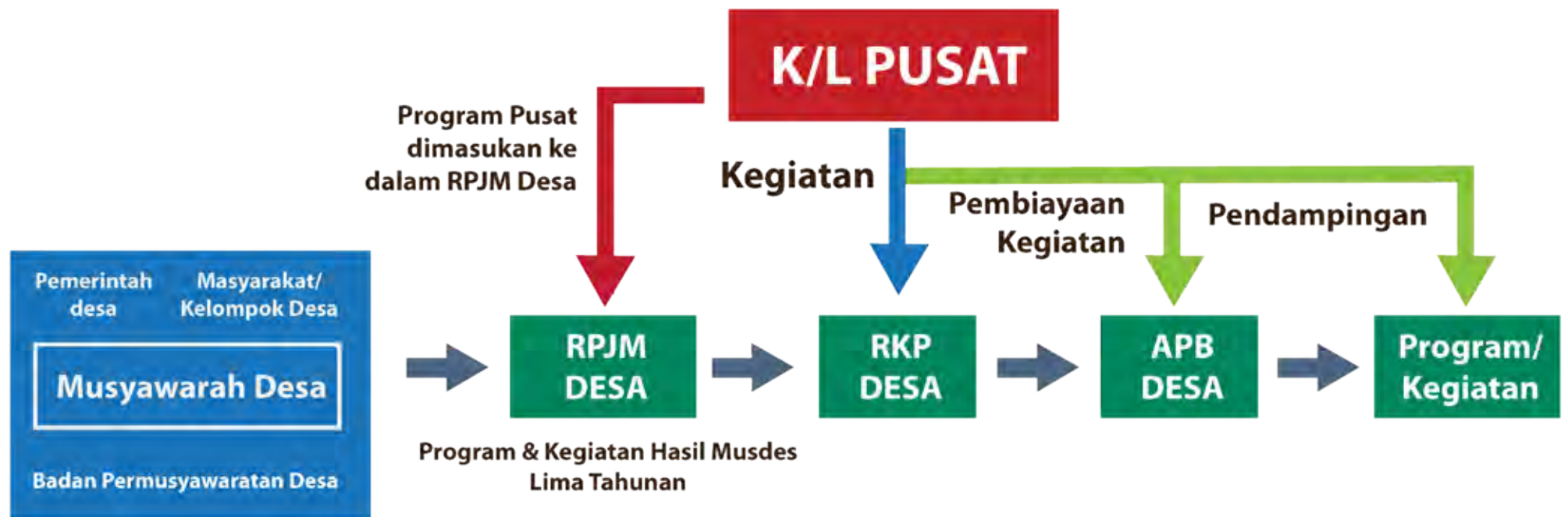
Peta Jalan PNPM menuju keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat

Tujuan:

- **Konsolidasi program pemberdayaan masyarakat agar mencerminkan prinsip pembangunan berbasis komunitas**
- **Integrasi prinsip pemberdayaan komunitas ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler**

**TNP2K aktif memberikan masukan agar
tata kelola PNPM dapat masuk ke
dalam Rancangan UU Desa yang
sekarang telah menjadi
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Tata Kelola Pembangunan Masyarakat Desa (Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)



TNP2K Terlibat Aktif dalam Penyusunan:

- **PP No. 43 Tahun 2014** Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- **PP No. 60 Tahun 2014** Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

// PNPM menggabungkan kekuatan masyarakat madani, partisipasi masyarakat lokal, serta transfer langsung dari pemerintah kepada masyarakat //

Kebutuhan Penyusunan Peraturan dan Pedoman

- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Mengatur Pembangunan Daerah dan Wilayah

- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Mengatur Pembangunan Desa

Komponen 1

Alokasi anggaran dan mekanisme penyaluran dana desa

6

Peraturan

PMK, Permendagri, SEB Kemendagri, KemenKeu, Bappenas

Komponen 2

Penyelenggaraan Pendampingan

3

Peraturan

SEB Bappenas, Kemendagri, KemenPU, SE Menko Kesra, SE Kemenkeu, Bappenas

Komponen 3

Tata kelola yang baik, pengawasan dan pemantauan

1

Peraturan

Permendagri

Komponen 4

Perencanaan dan penganggaran desa

3

Peraturan

Permendagri, SE Mendagri, Permendagri

Komponen 5

Kelembagaan masyarakat

2

Peraturan

SE Mendagri

Komponen 6

Pengelolaan aset-aset masyarakat

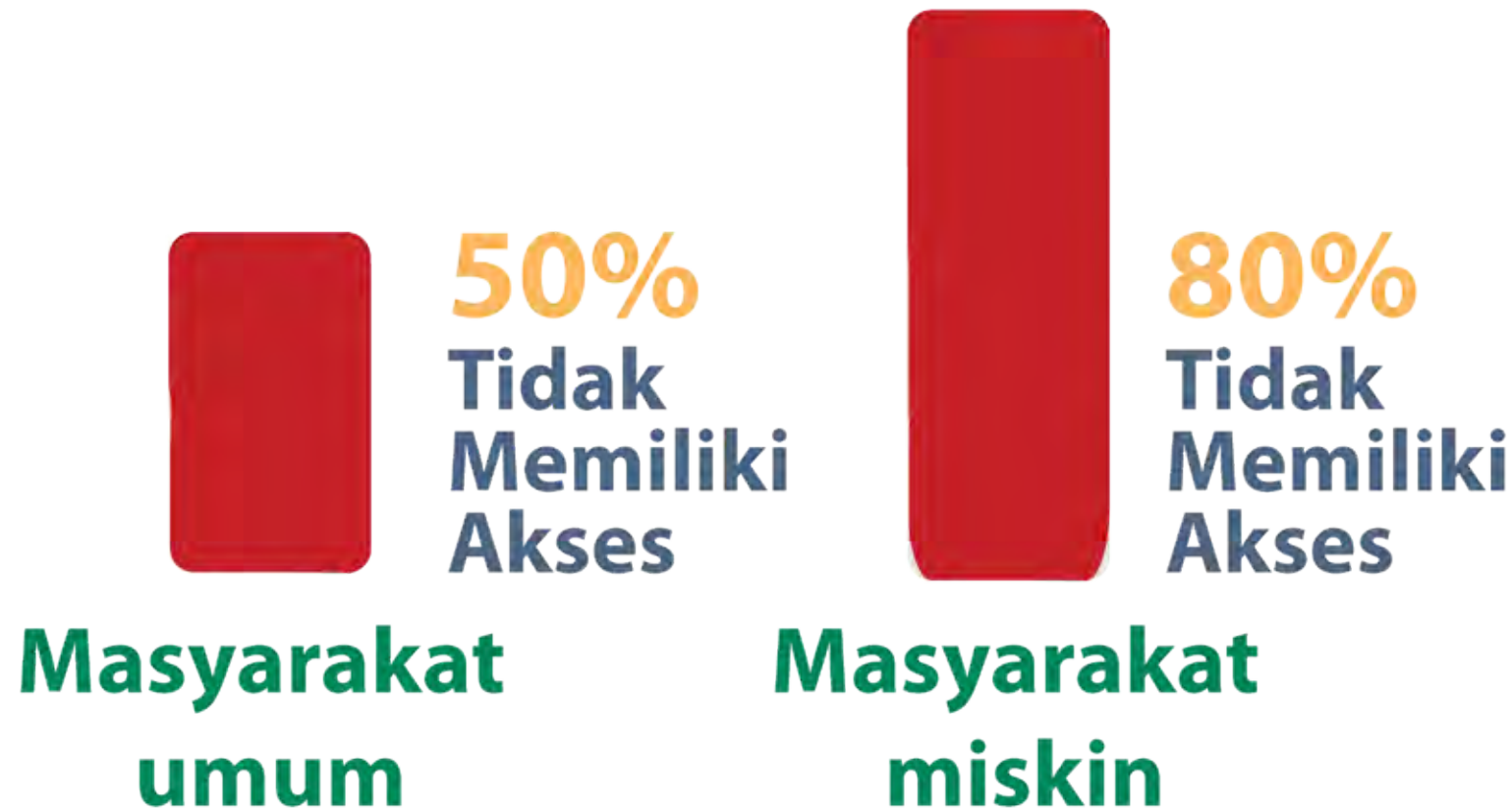
2

Peraturan

Permendagri

Keuangan Inklusif

Akses Terhadap Jasa Keuangan Formal



Akses Terhadap Perbankan





SEKRETARAT JERANG PERUBAHAN
REPUBLIK INDONESIA

National Strategy for Financial Inclusion
Fostering Economic Growth and
Accelerating Poverty Reduction

To Achieve a Financial Inclusion
by all Layers of the Core
Poverty Reduction Strategy

Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Mewujudkan Sistem Keuangan yang Dapat
Diakses oleh Seluruh Masyarakat untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan
serta Pemerataan Pendapatan di Kawasan ASEAN

TIM KERJA STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF | 2019-2024

**TNP2K, Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan
dan Kementerian Keuangan
melakukan sosialisasi
Peta Jalan Keuangan Inklusif**

Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 Tentang Layanan Keuangan Digital

INDONESIA FINANCE TODAY
DECIDE NOW

BI Terbitkan Regulasi Layanan Keuangan Digital

Reporter: Rivki Maulana
Editor: Sopia Siregar
Kamis 17 April 2014, 10:55:00

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) per 6 April 2014 telah memberlakukan ketentuan terkait layanan keuangan, yakni layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dengan menggunakan perangkat mobile atau layanan keuangan digital (LKD). Pejabat bank sentral mengatakan, layanan ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan penetrasi jasa keuangan ke wilayah pelosok.

Rosmaya Hadi, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan & Pengawasan Sistem Pembayaran BI mengatakan, semua penerbit uang elektronik bisa menjadi penyelenggara LKD. "Tapi hanya bank BUKU IV (yang memiliki modal inti di atas Rp 30 triliun) yang boleh menggandeng agen individu," ujar Rosmaya.

Berdasarkan data BI, hingga saat ini ada 17 penerbit e-money. Ia mengatakan, layanan LKD menggunakan e-money sebagai platform layanan, sehingga ketentuan yang baru diterbitkan merupakan revisi atas ketentuan e-money yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Peraturan Bank Indonesia No.16/8/2014 menyebutkan, kegiatan LKD harus menggandeng agen baik berbadan hukum maupun individu. Dalam beleid itu, penerbit electronic money, baik bank dan lembaga non-bank hanya bisa menggandeng agen yang memiliki badan hukum.

Sedangkan, bank dengan modal di atas Rp 30 triliun bisa menggandeng agen individu. Penyelenggara LKD berhak menunjuk agen sesuai dengan kriteria dalam regulasi dan bertanggungjawab terhadap risiko operasional agen.

Dalam regulasi LKD, jenis layanan dibedakan berdasarkan status e-money yang diterbitkan. Yakni e-money terdaftar dan e-money tidak terdaftar. Maksimal saldo dalam e-money yang terdaftar sebesar Rp 5 juta sedangkan yang tidak terdaftar hanya Rp 1 juta.

Pemilik e-money yang sudah mendaftarkan diri bisa melakukan beragam layanan mulai dari pembayaran transaksi, isi ulang saldo, transfer dana, tarik tunai, dan penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan, pemilik e-money yang tidak mendaftarkan diri tidak bisa melakukan transfer dana, tarik tunai, dan bantuan program pemerintah. (*)

Uji Coba Penyaluran Dana PKH Melalui Keuangan Elektronik

2.600
Rumah Tangga

4
Provinsi

- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Timur
- NTT

3 Bank
Komersial dengan
jaringan terluas



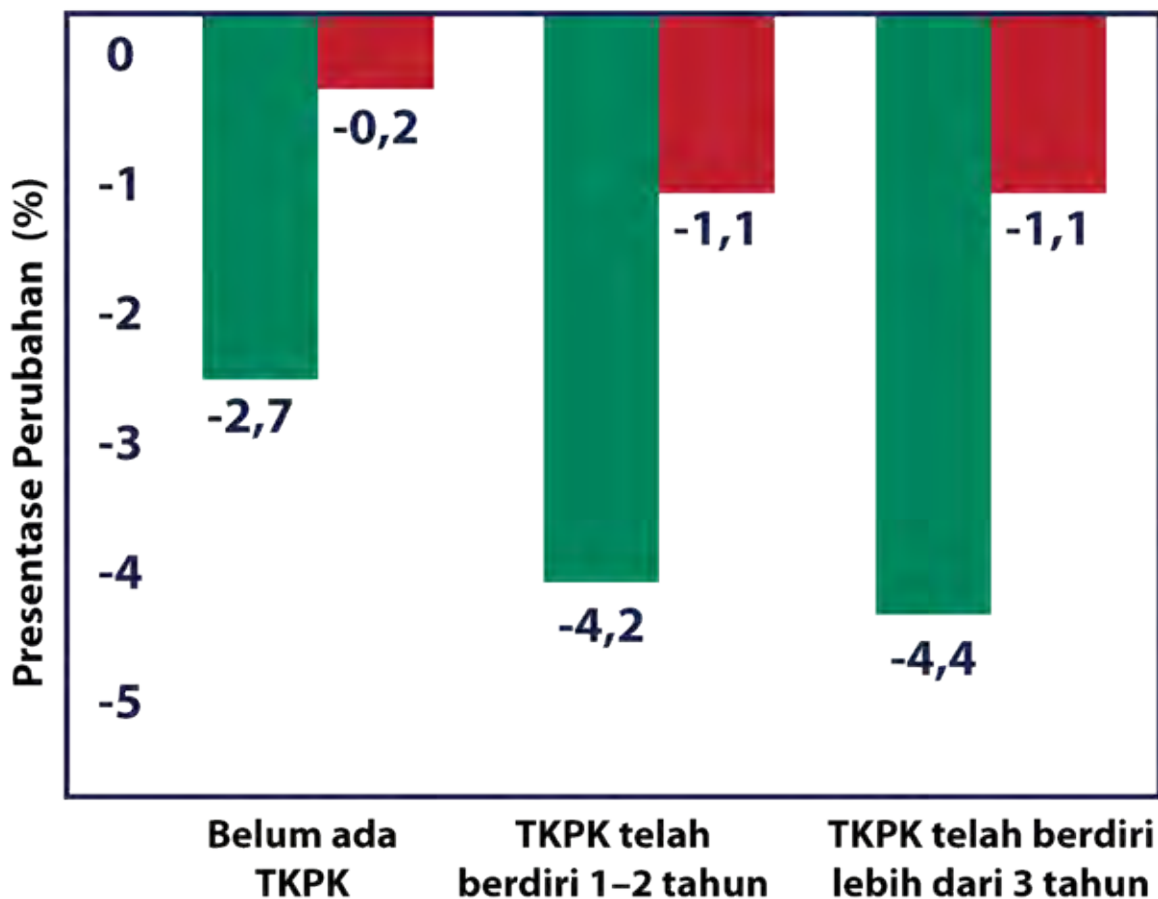
BANK BRI

mandiri

CIMBNIAGA

Penguatan TKPKD (ADVOKASI)

Korelasi Antara Terbentuknya TKPK dengan Pengurangan Kemiskinan 2005 - 2010



“ Di daerah yang memiliki TKPK, tingkat kemiskinan turun lebih cepat ”

 Perubahan Kedalaman Kemiskinan

 Perubahan Tingkat Kemiskinan

Semakin besar pengeluaran/belanja perlindungan sosial (terutama dalam kesehatan dan pendidikan) akan semakin memperkuat laju penurunan kemiskinan daerah

Sumber: Hasil Penelitian Sudarno Sumarto, Marc Vothknecht dan Laura Wijaya. Diterbitkan dalam Buku *“Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia”*, ISEAS Singapore

TKPK yang Terbentuk s/d Maret 2014

Provinsi

**34
(100%)**

Kabupaten

Kota

**465
(91,4%)**

Penyelenggaraan Rakor TKPK

Provinsi 100%

**Kabupaten/
Kota 75,27%**

**Rakor
min 3x /tahun**

**Dipimpin
Kepala Daerah**

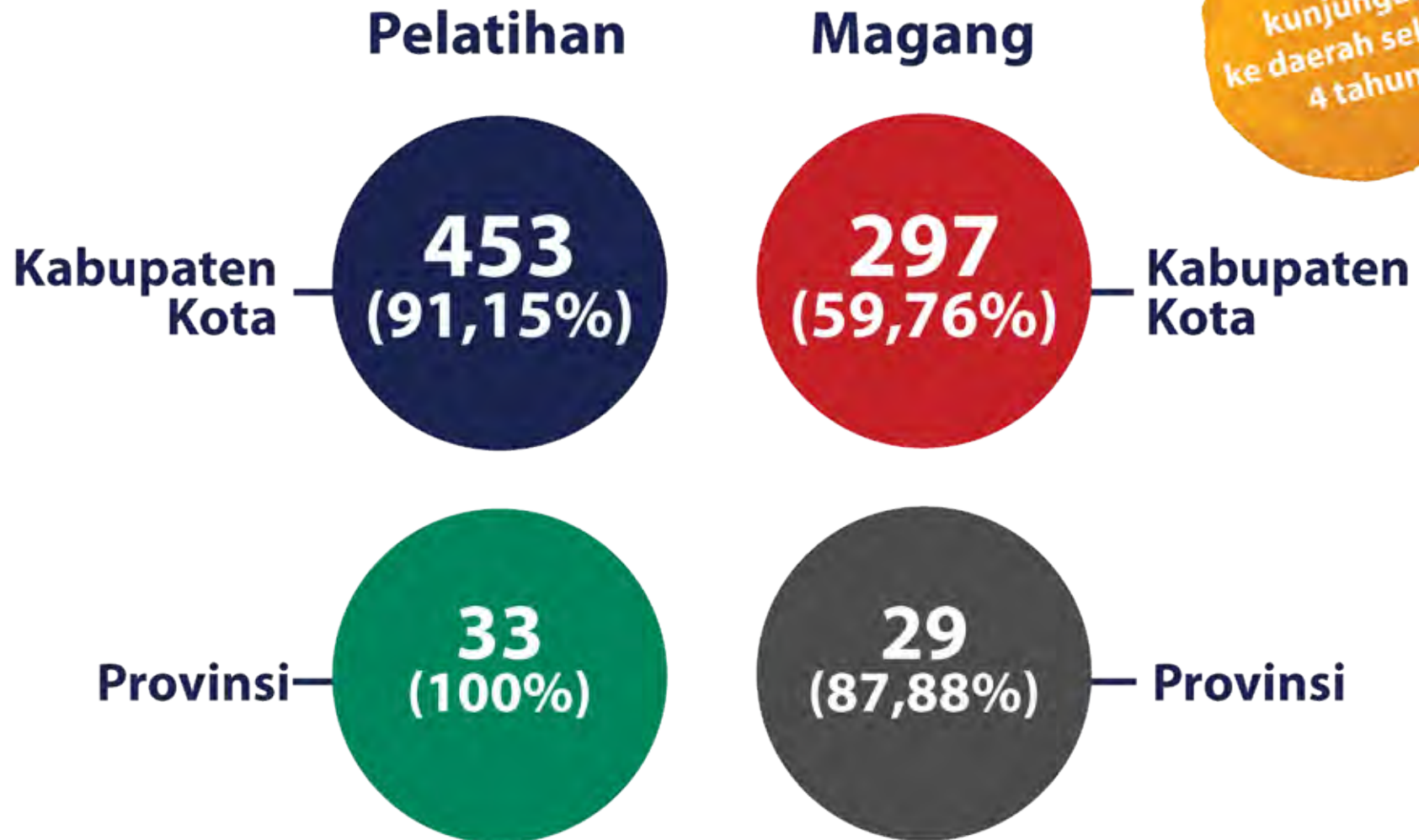
**Melibatkan Lintas
Sektor & Pemangku
Kepentingan**

60%

70%

52%

TKPK yang Ikut Pelatihan & Magang di TNP2K s/d Maret 2014



221 kunjungan ke daerah selama 4 tahun



Buku Panduan Penanggulangan Kemiskinan & Buku Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan yang diterbitkan oleh TNP2K

Contoh Peraturan Kepala Daerah Tentang SPKD



198 Daerah telah menyusun SPKD
31 Daerah telah menetapkan SPKD
dengan peraturan Kepala Daerah

Contoh Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

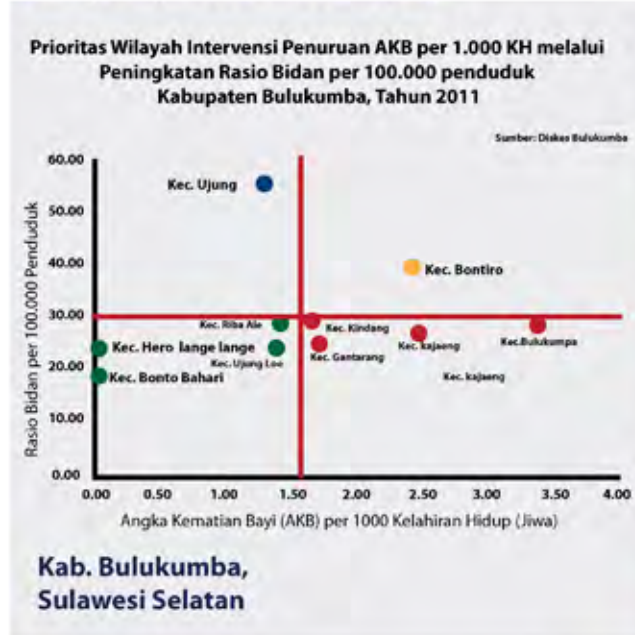


Contoh Analisis Kabupaten

ANALISIS POSISI RELATIF CAPAIAN INDIKATOR



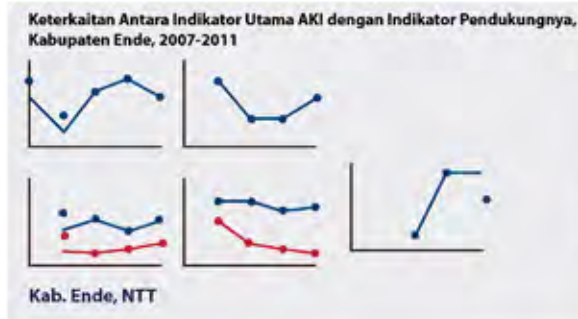
ANALISIS PRIORITAS WILAYAH INTERVENSI



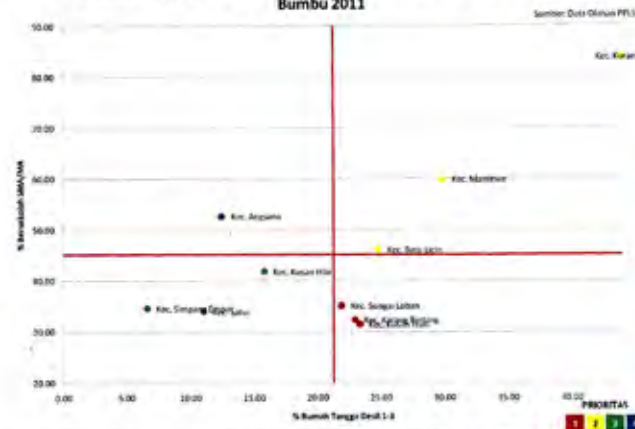
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kalimantan Selatan 2011



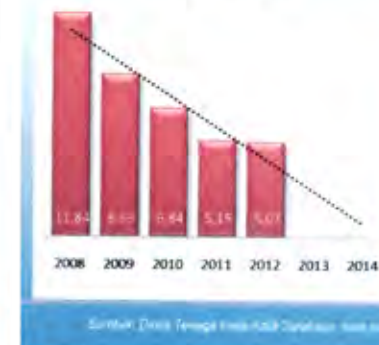
ANALISIS KETERKAITAN ANTAR INDIKATOR



% Rumah Tangga Desil 1-3 Terhadap % Bersekolah SMA/MA Kab. Tanah Bumbu 2011



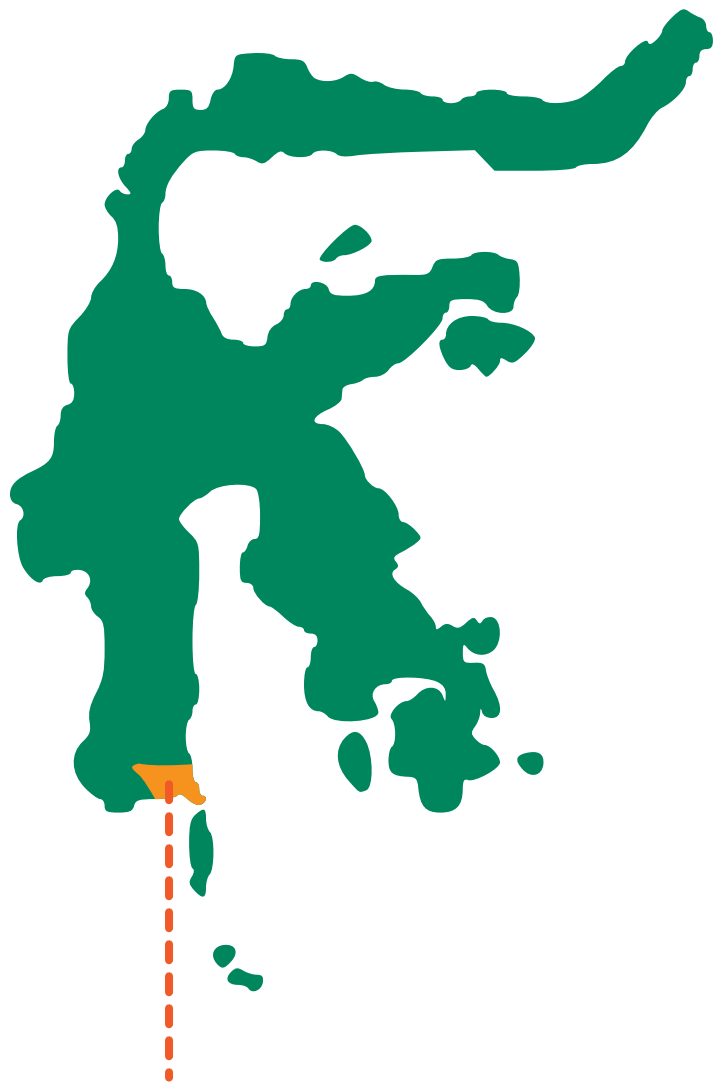
Gambar 56
Perkembangan dan Efektifitas TPT Kota Surabaya, Tahun 2008-2013



Gambar 57
Relevansi Capaian TPT Kota Surabaya Terhadap Propinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2008-2013



Contoh Laporan Analisis Kabupaten

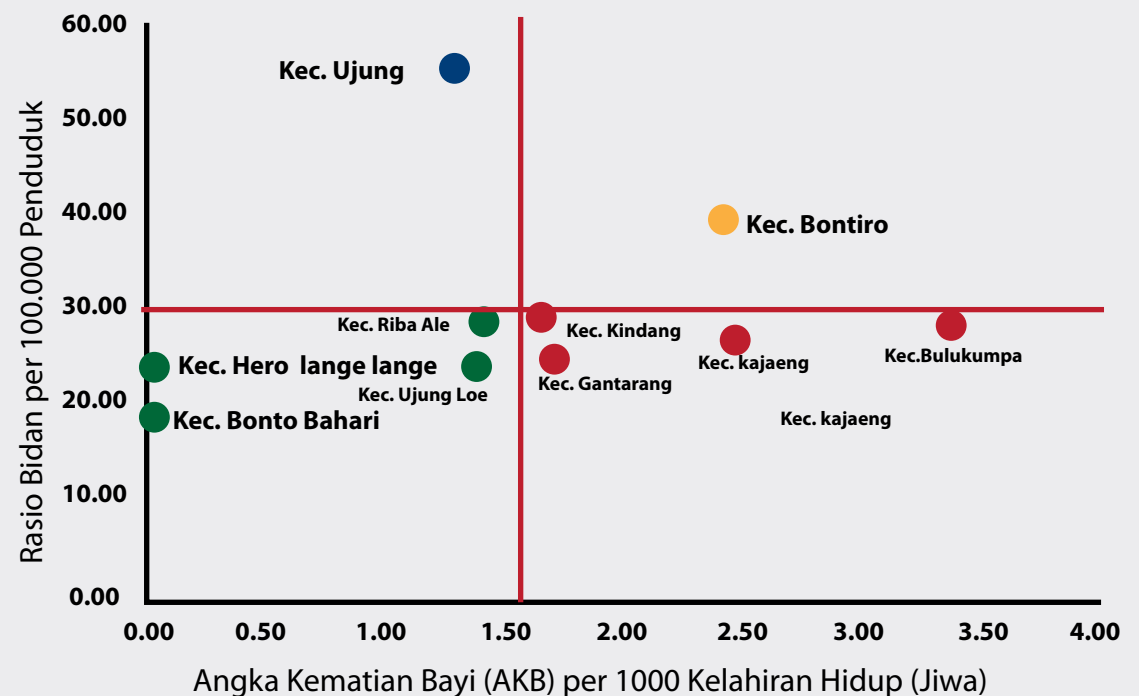


Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

ANALISIS PRIORITAS WILAYAH INTERVENSI

Prioritas Wilayah Intervensi Penurunan AKB per 1.000 KH melalui Peningkatan Rasio Bidan per 100.000 penduduk Kabupaten Bulukumba, Tahun 2011

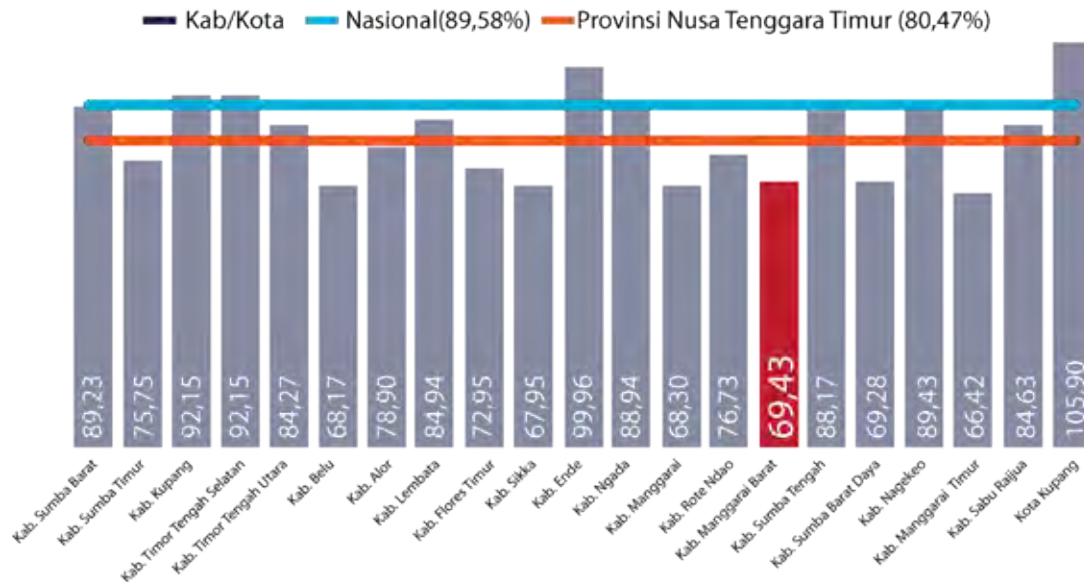
Sumber: Diskes Bulukumba



Peningkatan Anggaran Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

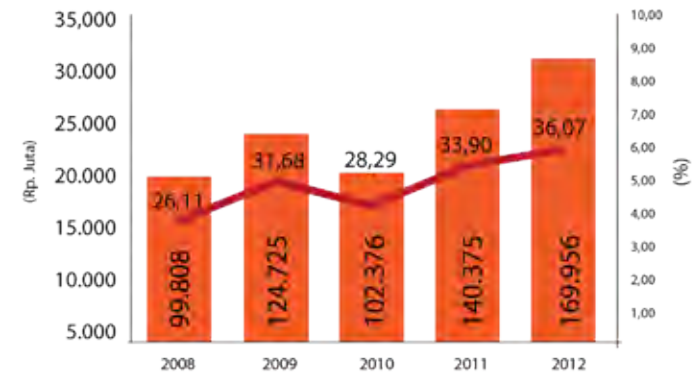
Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Manggarai Barat, 2011

Sumber: BPS, SUSENAS

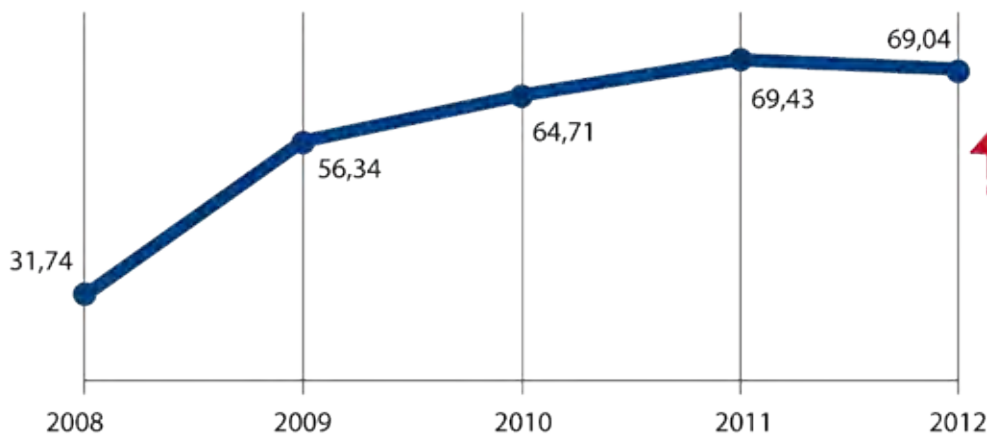


Perkembangan Anggaran Bidang Pendidikan dalam APBD Kabupaten Manggarai Barat, 2008 - 2012

■ Anggaran Bidang Pendidikan (Rp. Juta)
 ■ Proporsi Anggaran Bidang Pendidikan (%)



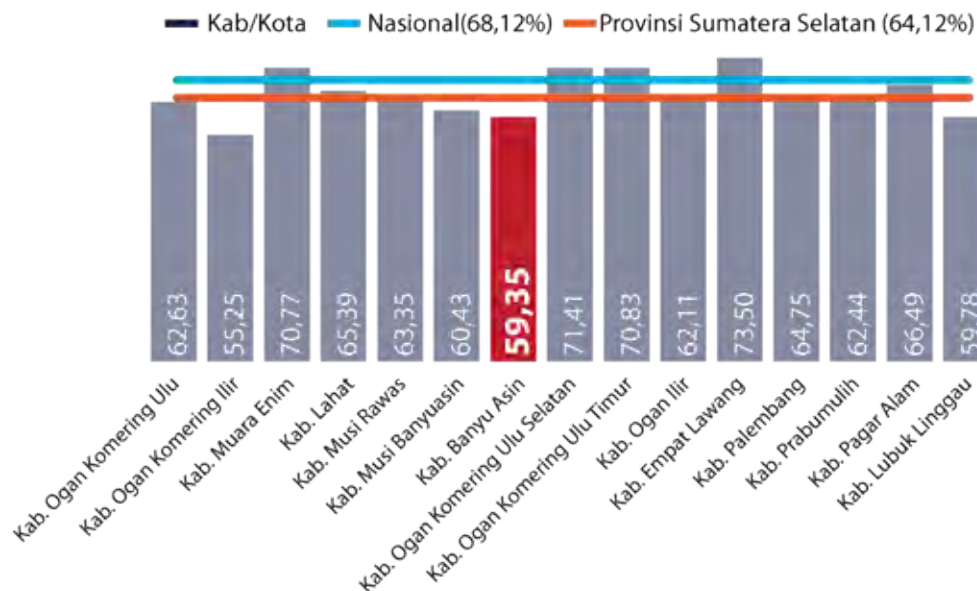
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Manggarai Barat, Tahun 2008 - 2012



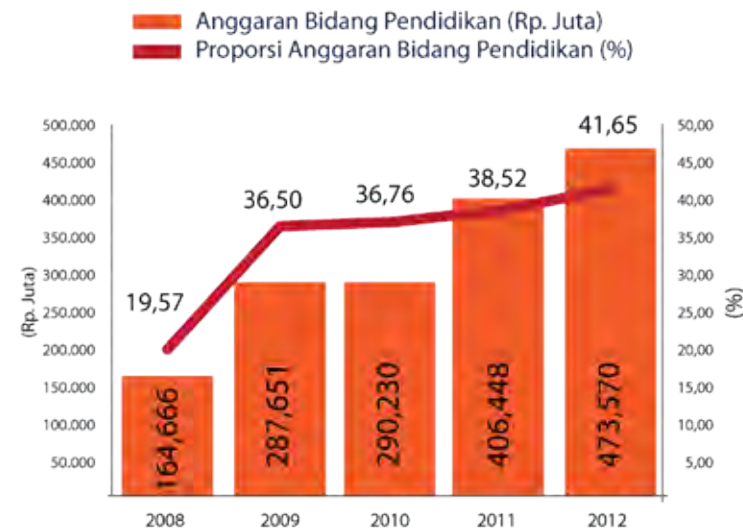
“ Setelah pendidikan teridentifikasi sebagai sektor prioritas, porsi APBD bidang pendidikan terus meningkat dan disertai perbaikan indikator pendidikan ”

Peningkatan Anggaran Pendidikan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

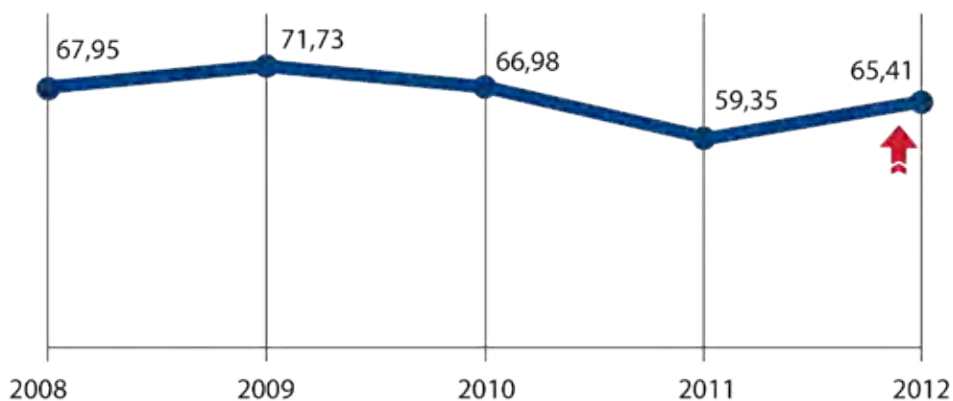
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs(%) Kabupaten Banyuasin, 2011 Sumber: BPS, SUSENAS



Perkembangan Anggaran Bidang Pendidikan dalam APBD Kabupaten Banyuasin, 2008 - 2012



Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs(%) Kabupaten Banyuasin, Tahun 2008 - 2012 Sumber: BPS, SUSENAS

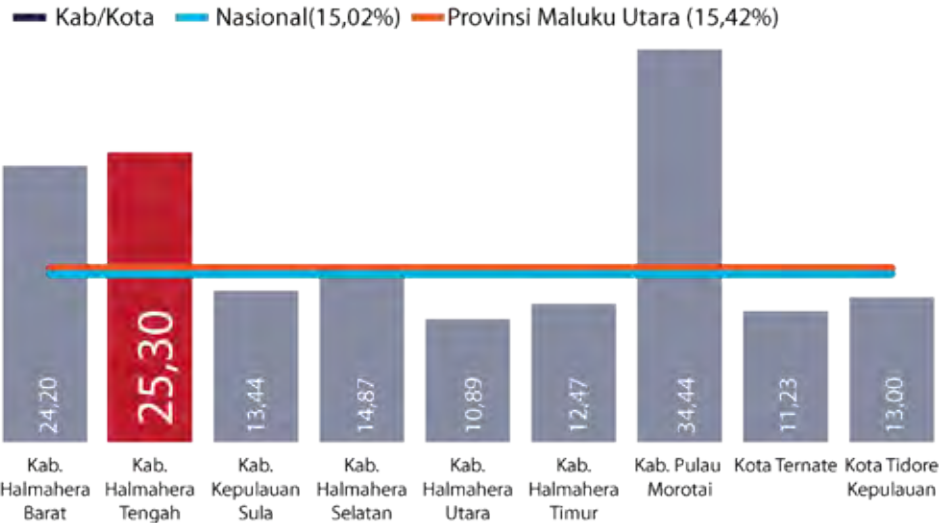


Setelah pendidikan teridentifikasi sebagai sektor prioritas, porsi APBD bidang pendidikan terus meningkat dan disertai perbaikan indikator pendidikan

Peningkatan Anggaran Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara

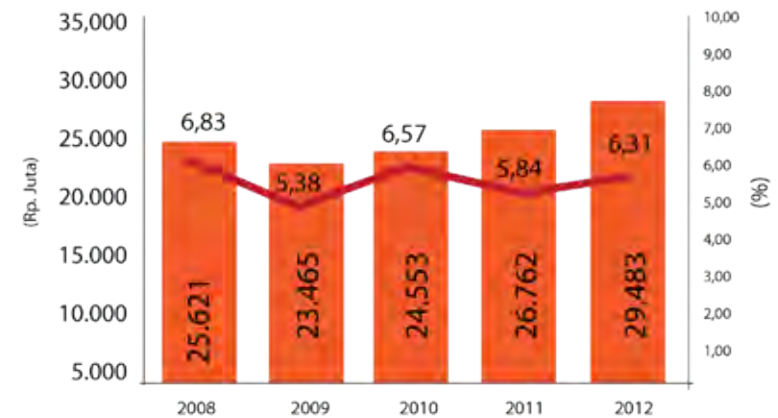
Posisi Relatif Angka Morbiditas (%) Kabupaten Halmahera Tengah, 2011

Sumber: BPS, SUSENAS



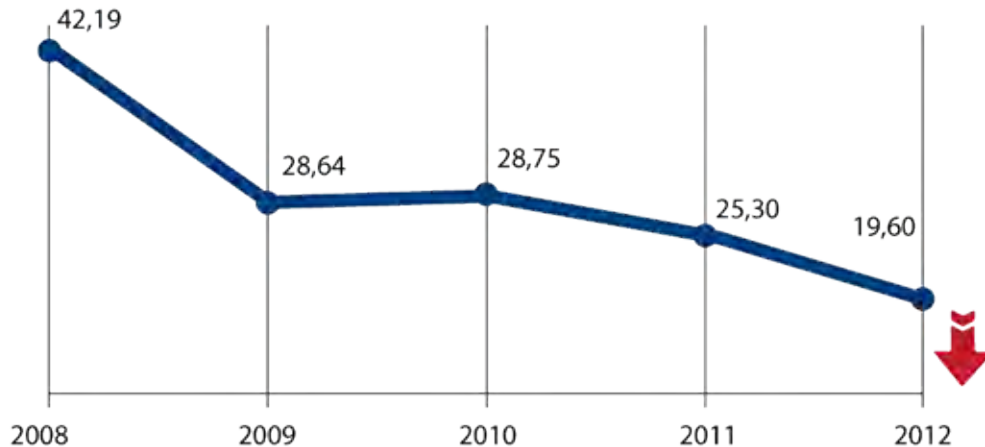
Perkembangan Anggaran Bidang Kesehatan dalam APBD Kabupaten Halmahera Tengah, 2008 - 2012

■ Anggaran Bidang Kesehatan (Rp. Juta) (Orange)
■ Proporsi Anggaran Bidang Kesehatan (%) (Red)



Perkembangan Angka Morbiditas (%) Kabupaten Halmahera Tengah, Tahun 2008 - 2012

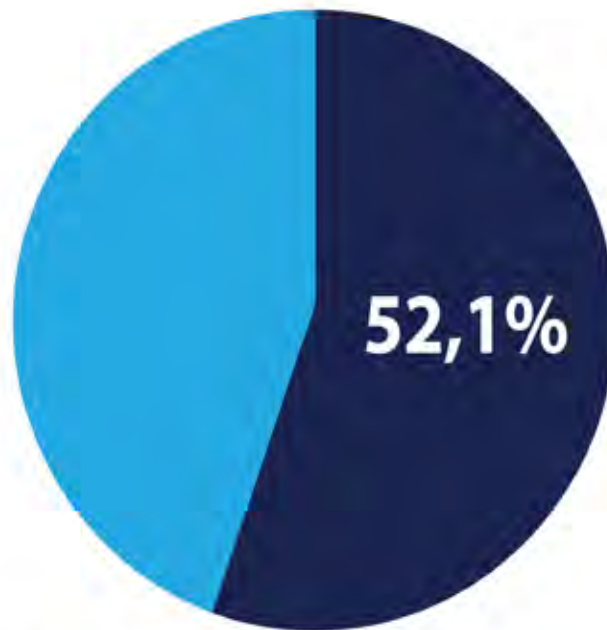
Sumber: BPS, SUSENAS



“ Setelah kesehatan teridentifikasi sebagai sektor prioritas, porsi APBD bidang kesehatan terus meningkat dan disertai perbaikan indikator kesehatan ”

Inovasi Uji Coba Mengaitkan Insentif Tunjangan Dengan Kinerja Guru

Gaji dan Tunjangan Guru



Anggaran Pendidikan

Anggaran gaji dan tunjangan guru
52,1% dari total anggaran pendidikan

Angka Kemangkiran Guru

**Penerima
Tunjangan**



31,5%

**Bukan Penerima
Tunjangan**



25,4%

Hasil Penelitian SMERU



Membangun Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja

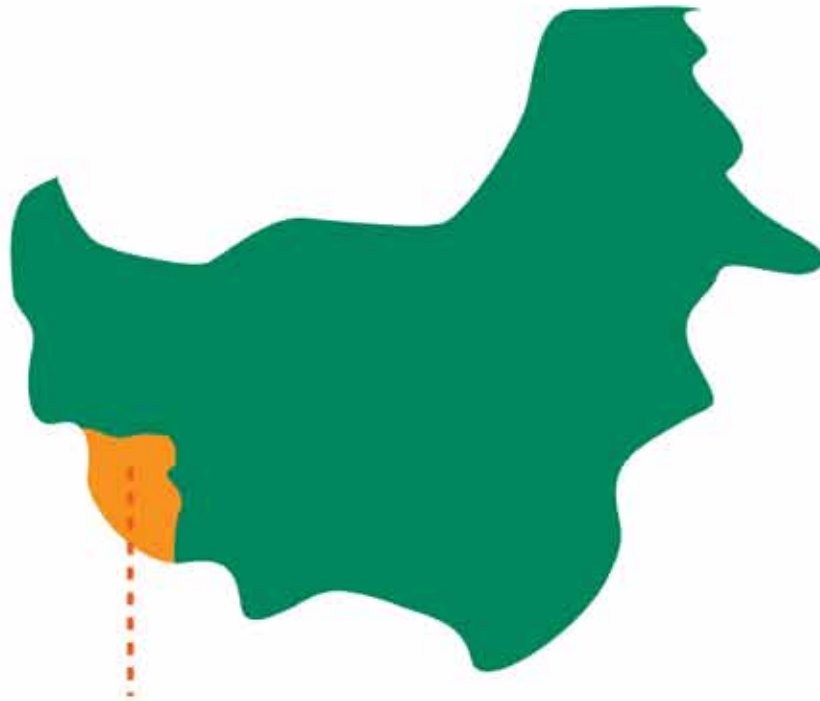
Elemen Uji Coba Kebijakan:

- Mengaitkan tunjangan guru dengan tingkat kehadiran dan kinerja guru.
- Melibatkan masyarakat dalam pengawasan.



Lokasi Uji Coba

Uji coba dilakukan di 31 sekolah di Kabupaten Kaimana, Keerom, dan Ketapang



**Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalbar**

**Kabupaten Keerom
Provinsi Papua**



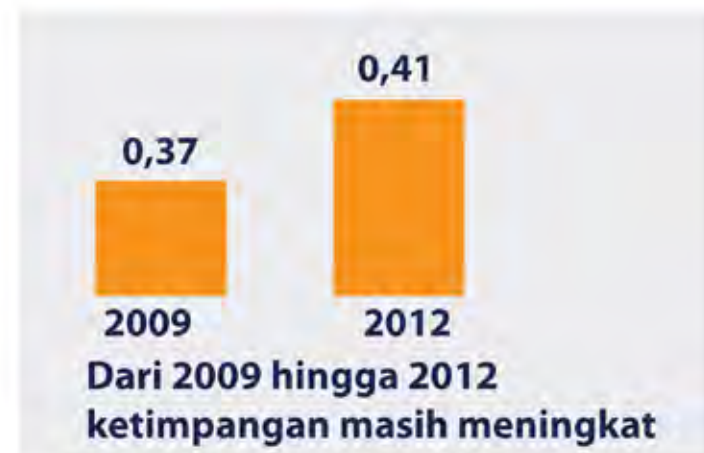
**Kabupaten Kaimana
Provinsi Papua Barat**



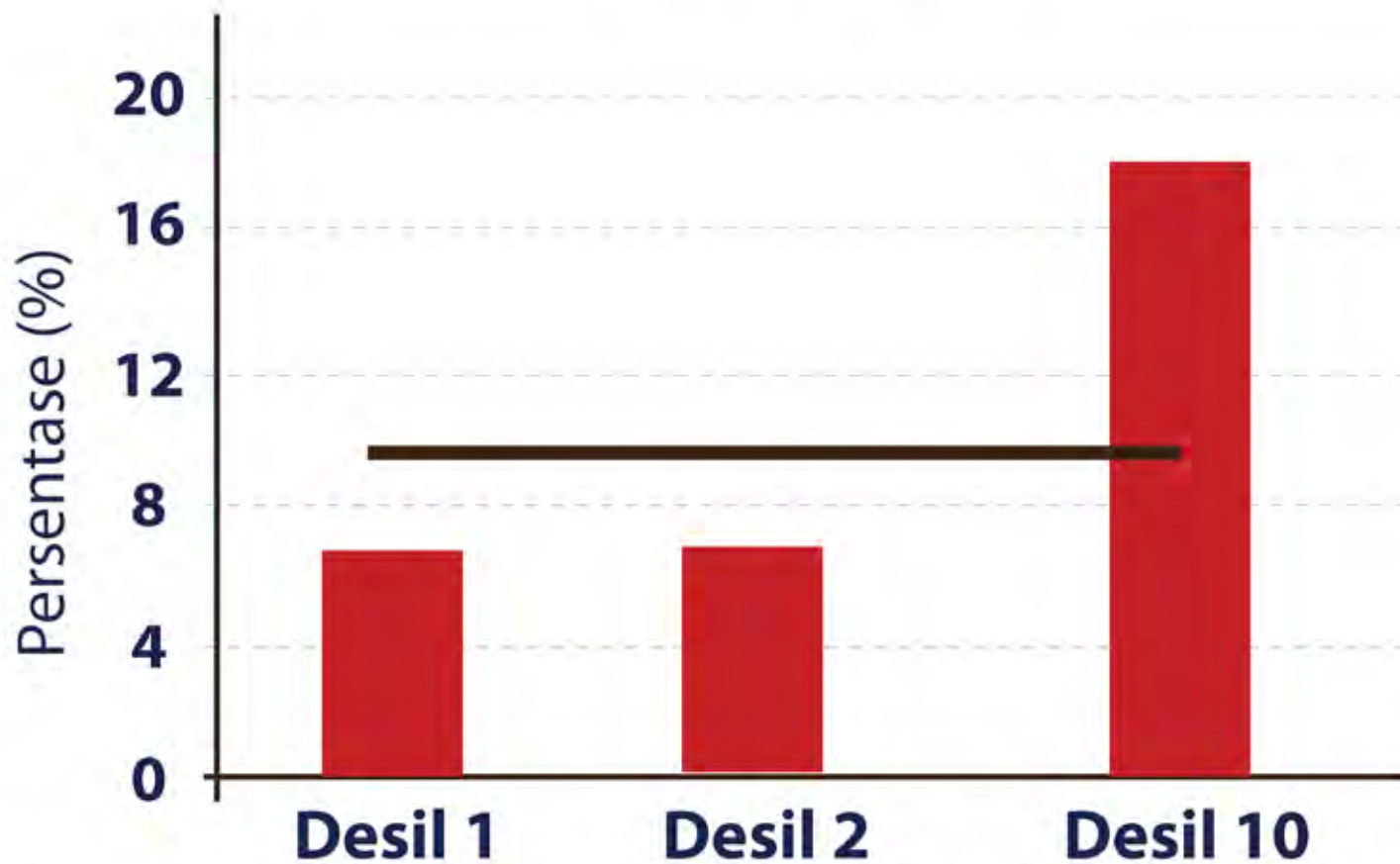
Penutup



**Penduduk miskin
berkurang
4,25 Juta
selama
5 Tahun**

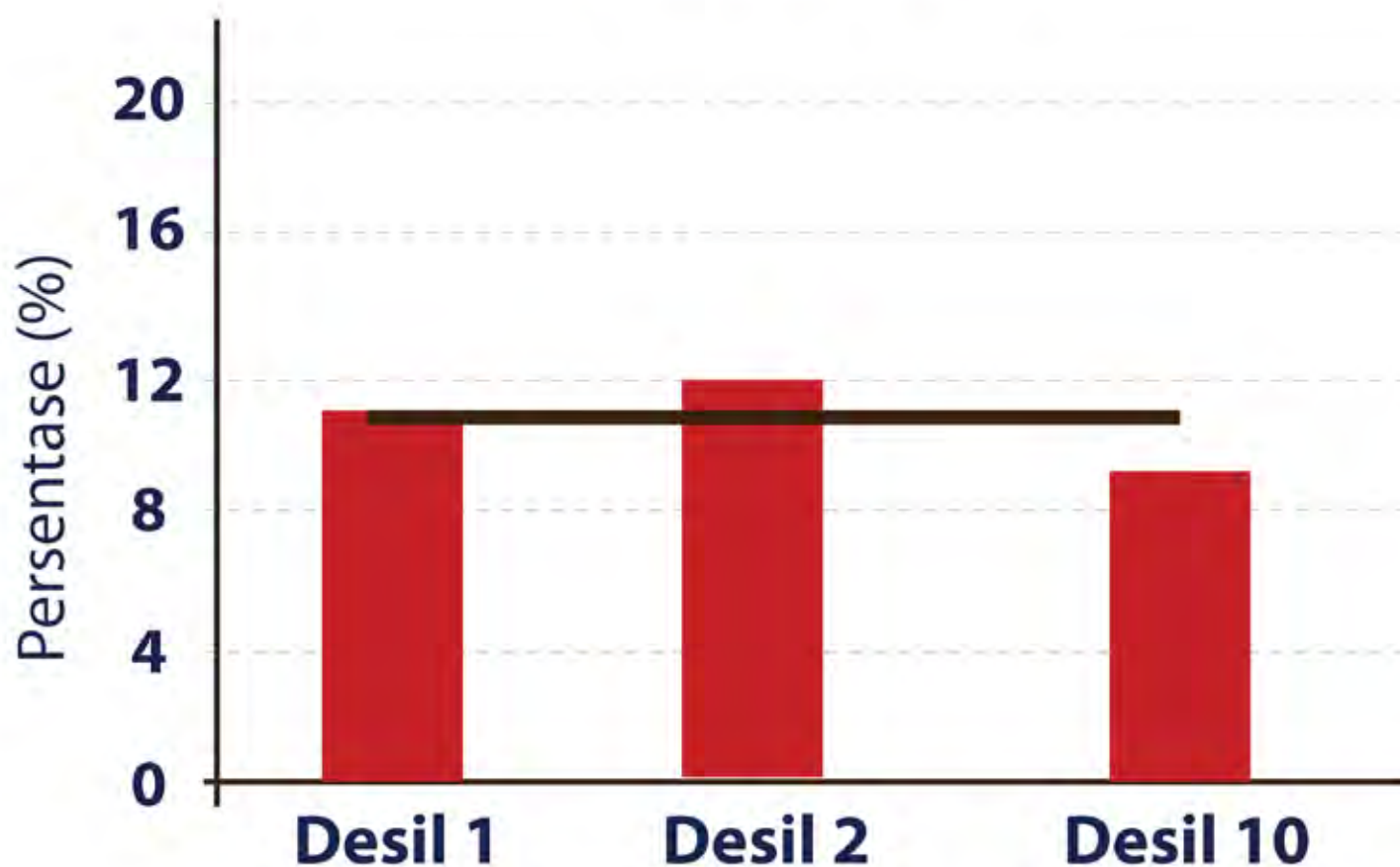


Pertumbuhan Konsumsi dan Garis Kemiskinan 2010 - 2014



Pertumbuhan Konsumsi Rata-rata 2010-2014
Perubahan Garis Kemiskinan

Pertumbuhan Konsumsi dan Garis Kemiskinan 2013 - 2014



Pertumbuhan Konsumsi Rata-rata 2013-2014
Perubahan Garis Kemiskinan

Inflasi Tahunan Kelompok Makanan dan Non Makanan



Inflasi kelompok makanan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok non-makanan. Sehingga beban kelompok miskin akan lebih berat

- Inflasi Tahunan - Makanan (%)
- Inflasi Tahunan
- Inflasi Tahunan - Non Makanan (%)

Survei Kaji Cepat

Fasilitas Pendidikan



Fasilitas Kesehatan



Dilakukan di
14 provinsi dan
20 kabupaten



Faktor Pendukung *Effective Policy Reform*



***Champion* dalam birokrasi**



Otoritas tingkat tinggi yang efektif



Ketersediaan sumber daya



***Pool of talent* yang profesional**

Terima Kasih



Prof. Dr. H. Boediono, M. Ec.
Wakil Presiden Republik Indonesia

Terima Kasih



Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE.
Ketua UKPK4

Terima Kasih



H.E. Greg Moriarty
Duta Besar Australia untuk Indonesia

Terima Kasih



Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan